

**KEKUATAN HUKUM VISUM ET REPERTUM SEBAGAI PEMBUKTIAN
TINDAK PIDANA PERKOSAAN
(Studi Kasus Pengadilan Negeri Sungguminasa)**



Skripsi

Di ajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Meraih Gelar
Sarjana Hukum (SH) Jurusan Ilmu Hukum
Pada Fakultas Syariah dan Hukum
(UIN) Alauddin Makassar

Oleh :

REZEKY SETYAWAN AMIR
NIM.10500113027

FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

UIN ALAUDDIN MAKASSAR

2017

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Rezeky Setyawan Amir
Nim : 10500113027
Tempat/Tgl. Lahir : Sinjai, 9 November 1994
Jurusan : Ilmu Hukum
Fakultas : Syariah dan Hukum
Alamat : BTN Pelita Asri Blok U9
Judul : Kekuatan Hukum Visum et Repertum Sebagai Pembuktian Tindak Pidana Perkosaan (Studi Kasus Pengadilan Negeri Sungguminasa)

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar adalah hasil karya sendiri. Jika di kemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Samata, 24 Juli 2017

Penyusun,



Rezeky Setyawan Amir

NIM : 10500113027

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi yang berjudul **“KEKUATAN HUKUM VISUM ET REPERTUM SEBAGAI PEMBUKTIAN TINDAK PIDANA PERKOSAAN (Studi Kasus Pengadilan Negeri Sungguminasa)”**, yang disusun oleh Rezeky Setyawan Amir, NIM: 10500113027, mahasiswa Jurusan Ilmu Hukum pada Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar, telah diuji dan dipertahankan dalam sidang Munaqasyah yang diselenggarakan pada hari Kamis, tanggal 15 Juni 2017, dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH) pada Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar.

Samata, 11 Juli 2017

DEWAN PENGUJI

Ketua	: Prof. Dr. Darussalam Syamsuddin, M.Ag	(.....)
Sekretaris	: Istiqamah, S.H., M.H.	(.....)
Munaqisy I	: Dr. Jumadi, S.H., M.H	(.....)
Munaqisy II	: Azhar Sinilele, S.H., M.H	(.....)
Pembimbing I	: Dr. Hamsir, S.H., M.Hum	(.....)
Pembimbing II	: Dr. Fadli Andi Natsif, S.H., M.H	(.....)

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

Diketahui oleh:

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum

UIN Alauddin Makassar,



Prof. Dr. Darussalam Syamsuddin, M.Ag

NIP. 19621016 199003 1 003

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji syukur penyusun panjatkan ke hadirat Allah Swt. yang telah memberikan taufik dan hidayah-Nya kepada penyusun, sehingga proses penyusunan skripsi ini yang berjudul “Kekuatan Hukum Visum et Repertum sebagai Pembuktian Tindak Pidana Perkosaan (Studi Kasus Pengadilan Negeri Sungguminasa)” dapat diselesaikan dengan baik.

Salawat dan salam semoga dilimpahkan kepada Nabi Muhammad Saw sebagai *rahmatan li al-'alaimin* yang telah membawa umat manusia dari kesesatan kepada kehidupan yang selalu mendapat sinar ilahi.

Saya sangat menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan karena keterbatasan yang saya miliki, tapi karena dukungan dan bimbingan serta doa dari orang-orang sekeliling saya akhirnya dapat menyelesaikan skripsi ini.

Rasa terima kasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya saya berikan kepada :

1. Prof. Dr. H. Musafir Pababbari, M.Si selaku Rektor Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.
2. Prof. Dr. Darussalam Syamsuddin, M.Ag selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.
3. Ibu Istiqamah S.H.,M.H selaku ketua Jurusan Ilmu Hukum dan Bapak Rahman Syamsuddin S.H.,M.H selaku Sekretaris Jurusan Ilmu Hukum.
4. Bapak Dr.Hamsir,S.H.,M.Hum dan Bapak Dr.Fadli Andi Natsif.S.H,M.H selaku pembimbing yang senantiasa membimbing ananda dalam proses penulisan

skripsi ini.

5. Ketua Pengadilan Negeri Sungguminasa yang telah memberikan kesempatan kepada penyusun untuk melakukan penelitian.
6. Seluruh Dosen Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, terima kasih untuk seluruh didikan, bantuan dan ilmu yang telah diberikan kepada penyusun.
7. Kedua orang tua tercinta Hj.Sitti Rosmini dan H.Muh.Amir Soi yang tak henti-hentinya telah memberikan dukungan, kasih sayang yang luar biasa besarnya dan lantunan doa di berikan kepada penyusun mulai dari kecil sampai sekarang ini, tak terhitung pula pengorbanan yang mereka beri, semoga mereka selalu dalam lindungan Allah SWT .
8. Serta keluarga besarku di Kabupaten Sinjai yaitu Nenek Hj.Satiamawa, Kakanda Arni Handayani Amir, Nurhayani Amir, Arjunayanti Amir dan keponakan Keisya Alisa Qaisara, Diva Khairani Batrisya , Raisha Najwa Ghaliza, Rasyafa Gaizhan Aqbari yang selalu memberikan dukungan yang terbaik.
9. Keluarga besar Resonancee (Kelas XII IA 4) SMA NEG 1 SINJAI Sinjai, teman-teman yang masih setia menjadi tempat bertukar pikiran dan menjadi teman penyusun terima kasih telah mengajarkan arti sebuah pertemanan.
10. Keluarga besar Ilmu Hukum A Angkatan 2013, Saudara-saudara seperjuangan, Terima kasih untuk kalian semua, kalian saudara yang hebat dan luar biasa.
11. Keluarga besar HP3 (Himpunan Pemuda Peduli Pendidikan), PPL Kejaksaan Sinjai dan Pengadilan Negeri Sinjai yang memberikan dukungan kepada penyusun
12. Keluarga KKN-R Angkatan 53 Desa Bontolangkasa Selatan Kecamatan

Bontonompo yang telah memberikan dukungan dalam penyelesaian Skripsi ini.

Untuk kesempurnaan skripsi ini, penyusun mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari semua pihak, semoga skripsi ini kedepannya dapat bermanfaat untuk semua orang.

Makassar, 22 Mei 2017

Penyusun,

Rezeky Setyawan Amir

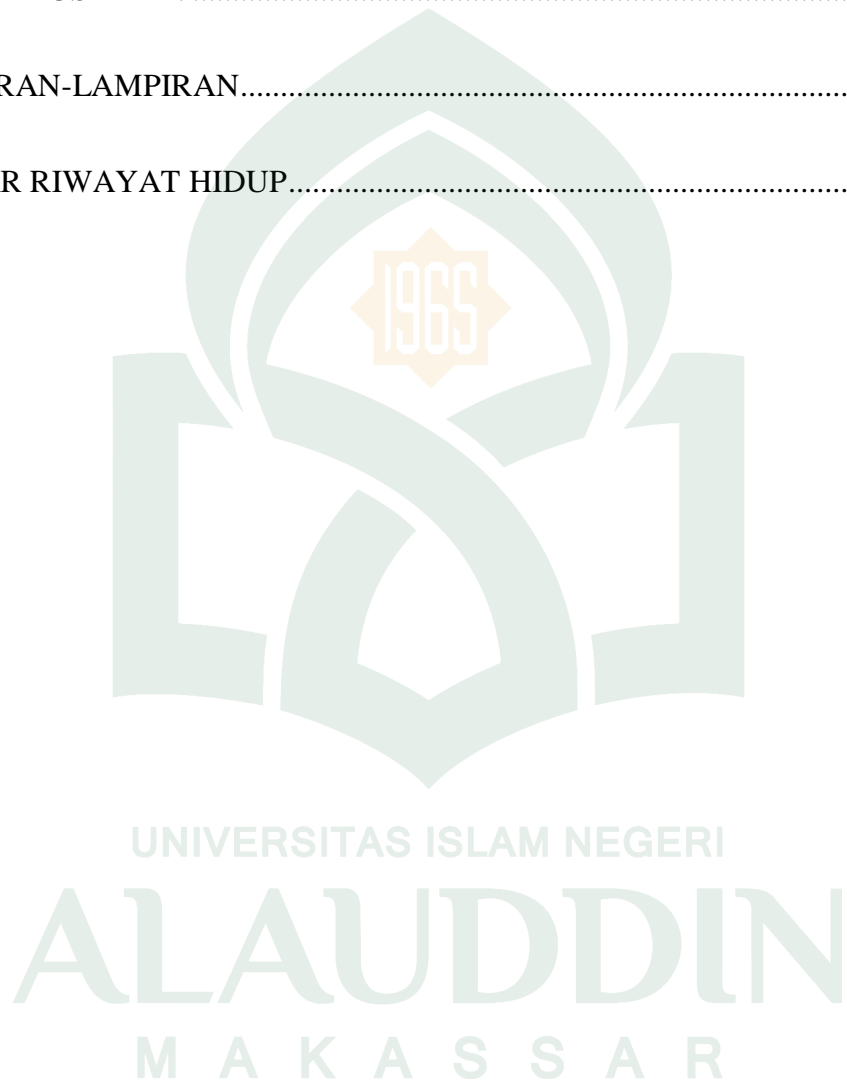


DAFTAR ISI

JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	ii
PENGESAHAN	iii
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI.....	vii
ABSTRAK	x
BAB I PENDAHULUAN	1-9
A. Latar Belakang	1
B. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus	5
C. Rumusan Masalah	7
D. Kajian Pustaka.....	7
E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	8
BAB II TINJAUAN TEORITIS	10-43
A. Tinjauan Tentang Tindak Pidana	10
1. Pengertian Tindak Pidana	10
2. Unsur-Unsur Perbuatan Pidana	11
3. Jenis-Jenis Tindak Pidana	14
B. Tinjauan Tentang Tindak Pidana Perkosaan	15
1. Pengertian Tindak Pidana Perkosaan	15
2. Jenis-Jenis Tindak Pidana Perkosaan.....	23
C. Tinjauan Tentang Pembuktian	27

1. Pengertian Pembuktian.....	27
2. Paramater Pembuktian	29
3. Sistem Pembuktian yang dianut di Indonesia	33
4. Alat Bukti	34
D. Tinjauan Tentang Visum et Repertum	40
1. Pengertian Visum et Repertum	40
2. Prosedur Administratif dalam Meminta Visum	42
3. Bagian-Bagian Visum	42
4. Kekuatan daya bukti Visum et Repertum	43
5. Visum et Repertum dlam delik Kesusilaan	43
BAB III METODE PENELITIAN.....	45-47
A. Jenis dan Lokasi Penelitian	45
B. Metode Pendekatan	45
C. Sumber Data.....	46
D. Metode Pengumpulan Data	46
E. Analisis Data	47
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	48-80
A. Aturan Hukum Tentang Visum et Repertum sebagai Pembuktian Tindak Pidana Perkosaan	48
B. Pengaruh Visum et Repertum terhadap pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan.....	54
BAB V PENUTUP.....	81-82

A. Kesimpulan	81
B. Implikasi Penelitian.....	82
DAFTAR PUSTAKA.	83-84
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	85-121
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	122



ABSTRAK

Nama : Rezeky Setyawan Amir
Nim : 10500113027
Judul : Kekuatan Hukum Visum et Repertum Sebagai Pembuktian Tindak Pidana Perkosaan (Studi Kasus Pengadilan Negeri Sungguminasa)

Tindak pidana perkosaan yang marak terjadi pada wanita dan anak-anak beberapa tahun terakhir, menimbulkan keresahan di masyarakat. Dalam suatu proses pembuktian kasus perkosaan di perlukan alat bukti yang dapat meyakinkan majelis hakim, pokok masalah penelitian ini adalah kekuatan hukum dari *Visum et Repertum* dalam hal pembuktian kasus perkosaan. Pokok masalah tersebut selanjutnya di-breakdown ke dalam beberapa sub masalah atau pertanyaan penelitian, yaitu : 1) Bagaimana aturan hukum tentang *Visum et Repertum* sebagai pembuktian dalam tindak pidana perkosaan di Pengadilan Negeri sungguminasa? 2). Bagaimana Pengaruh *Visum et Repertum* terhadap pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan di Pengadilan Negeri Sungguminasa?

Jenis penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif-empiris atau yuridis-sosiologis. Adapun sumber data penelitian ini bersumber dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Penelitian ini tergolong penelitian dengan jenis data kualitatif yaitu dengan mengelola data primer yang bersumber dari wawancara dengan Hakim Pengadilan Negeri Sungguminasa

Hasil penelitian menunjukkan bahwa 1) Aturan Hukum tentang *Visum et Repertum* sebagai pembuktian tindak pidana perkosaan terdapat pada pasal 184 ayat (1) huruf c lalu secara khusus dalam 187 huruf c KUHAP. *Visum et Repertum* memiliki posisi yang cukup fundamental karena termasuk dalam alat bukti surat yang sah dan berkekuatan hukum, karena telah diatur dan dibenarkan oleh undang-undang. Dalam kasus perkosaan visum memiliki peran penting sebagai alat bukti untuk membuka terang menderang suatu kasus, khususnya perkosaan karena memuat pemberitaan untuk membuktikan dakwaan dan memperkuat keyakinan hakim, namun visum bukanlah alat bukti satu-satunya, tapi tetap harus dirangkaikan dengan alat bukti lainnya. 2) Pengaruh *Visum et repertum* terhadap pertimbangan hakim memiliki keterkaitan satu sama lain,. Dan terbukti dalam penerapannya di PN Sungguminasa ,hakim memutus dengan pertimbangan keterangan visum dan terdakwa di putus bersalah atas perbuatannya dari hasil analisis penulis pada putusan nomor 06/Pid.Sus/2016/PN.Sgm. Alat bukti surat *visum et repertum* memiliki keterikatan atau pengaruh terhadap pertimbangan hakim dapat dilihat jika hakim meyetujui atau menerima hasil riwayat pemeriksaan dan pemberitaan kesimpulan dari *visum et repertum*, kemudian hasil itu di sertakan atau dirangkaikan dengan alat bukti lain, sehingga majelis hakim yakin bahwa telah terjadi tindak pidana perkosaan dan terdakwa yang bersalah telah melakukannya.

Implikasi penelitian menunjukkan bahwa 1). Visum harusnya dilakukan pada setiap

dugaan kasus perkosaan, karena visum dapat di jadikan rujukan untuk pertimbangan hakim nantinya di persidangan khususnya kasus perkosaan yang memiliki alat bukti yang sedikit *minimum evidence*.2) Hakim seharusnya mempertimbangkan keterangan yang termuat dalam *Visum et Repertum* karena selain merupakan alat bukti surat yang sah menurut undang-undang juga merupakan hasil pemeriksaan dari seorang dokter yang berdasarkan keilmuannya bernilai objektif.



BAB I

PENDAHULUAN

A. *Latar Belakang Masalah*

Hukum merupakan suatu perangkat norma-norma yang benar dan salah, yang dibuat atau diakui eksistensinya oleh pemerintah, yang di tuangkan baik dalam aturan tertulis maupun tidak tertulis, yang mengikat sesuai dengan kebutuhan masyarakatnya secara keseluruhan, serta dengan ancaman sanksi bagi pelanggar aturan itu. Sehingga hukum bukan hanya undang-undang diciptakan oleh pemerintah, tetapi cukup diakui, meliputi pula perkembangan-perkembangan dari konvensi-konvensi internasional.¹ Indonesia adalah negara yang secara tegas mengakui sebagai negara hukum seperti yang tertuang dalam Pasal 1 ayat 3 Undang Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.

Suatu kenyataan hidup bahwa manusia itu tidak bisa sendiri. Manusia hidup berdampingan ,bahkan berkelompok-kelompok dan sering mengadakan hubungan antar sesamanya. Hubungan itu terjadi berkenaan dengan kebutuhan hidupnya yang tidak mungkin selalu bisa di penuhi sendiri. Kebutuhan hidup manusia bermacam-macam.² Seiring majunya zaman, perkembangan sains dan teknologi, serta arus globalisasi yang semakin kuat kebutuhan manusia juga semakin meningkat ,Namun seiring peningkatan kebutuhan tersebut juga membawa efek negatif, angka kejahatan juga semakin meningkat dengan motif dan cara yang makin beragam.

¹ Syaiful Bakhri *Sistem Peradilan Pidana Indonesia Dalam Perspektif Pembaruan Hukum, Teori, dan Praktik Peradilan* Pustaka Pelajar Yogyakarta 2015 h1

² R.Abdoel Djamali, *Pengantar Hukum Indonesia* Edisi Revisi PT Raja Grafindo Persada 2012 h1

Tindak Pidana Perkosaan adalah salah satu kejahatan yang masih menjadi carut hukum hingga saat ini. Perkosaan berasal dari kata latin “*rapere*” yang berarti mencuri, merampas atau membawa pergi, di dalam Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP) perkosaan dimuat dalam pasal 285 KUHP yang berbunyi “Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seseorang wanita bersetubuh dengan dia di luar perkawinan, diancam karena melakukan perkosaan dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun”.³

Tentang Hukum pidana, dapat diketahui bahwa ia adalah keseluruhan hukum yang berlaku disuatu negara, yang mengadakan dasar-dasar dan aturan-aturan, untuk menentukan perbuatan yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang, dengan disertai ancaman atau sanksi berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar aturan tersebut. menentukan kapan dan dalam hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan-larangan itu, dapat dikenakan atau di jatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan⁴.

Salah satu yang cukup menyedot perhatian kasus kejahatan seksual semakin menjamur dan meresahkan masyarakat beberapa tahun terakhir, adapun perempuan dan anak adalah yang paling sering menjadi korban. Seperti yang terjadi di Sulawesi Selatan, sejumlah kasus kejahatan seksual terkuak. Aksi pelecehan seksual masih marak di Sulawesi Selatan. Dari data Polda Sulsel, ada 248 anak dicabuli dan 69 perempuan diperkosa sepanjang 2016, angka itu tercatat meningkat di bandingkan laporan kasus serupa di tahun 2015 membukukan 208 kasus pencabulan dan 65 kasus

³ Republik Indonesia, *Undang-Undang RI No.8 Tahun 1981 Tentang Acara Pidana* Bab XIV Laksana 2014 h 497

⁴ Syaiful Bakhri *Sistem Peradilan Pidana Indonesia Dalam Perspektif Pembaruan Hukum, Teori, dan Praktik Peradilan* Pustaka Pelajar Yogyakarta 2015 h 6-7

pemeriksaan.⁵ Hal ini menambah daftar hitam kasus hukum ,yang masih menjadi benalu dan carut maruk hukum di negeri ini.

Proses penegakan hukum terhadap tindak pidana perkosaan haruslah dilakukan demi terciptanya keadilan dan kepastian hukum, serta agar si korban mendapatkan keadilan dan pelaku mendapat hukuman yang setimpal dengan perbuatannya dan dalam penegakannya tetap menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan yang beradab. Proses penegakan dari hukum pidana biasa juga disebut dengan hukum acara pidana yang selalu berkaitan dengan sistem peradilan pidana atau biasa dikenal dengan istilah “*Criminal Justice System*”, proses sistem peradilan pidana di mulai dari kepolisian ,kejaksaan, dan pengadilan. Hal esensial dari hukum acara pidana adalah dalam rangka penegakan hukum pidana materiil. Namun yang menjadi kendala dalam penegakan hukum pada kasus perkosaan biasanya, korban perkosaan takut dan malu menceritakan atau melaporkan kepada pihak kepolisian sehingga menjadikan larut dalam waktu yang lama, menyebabkan petunjuk atau bukti yang bisa ditemukan malah hilang sehingga bisa saja di alat bukti yang ditemukan sangat minim yang tentunya akan menyulitkan pembuktian di persidangan nantinya.

Dalam proses penegakan hukum para penyelidik ataupun penyidik harus mengumpulkan kebenaran materil untuk membuka terang menderang kasus perkosaan sebagai pembuktian penuntut umum dalam dakwaanya di persidangan

⁵ Ibnu Kasir Amahoru, “*Setahun,Kasus Pencabulan dan Pemerksaan di Sulsel Meningkat*”,

Rakyatku.com 31 Desember 2016 ,<http://news.rakyatku.com/read/33315/2016/12/31/setahun-kasus-pencabulan-dan-pemerksaan-di-sulsel-meningkat> (29 Maret 2017)

dan memperkuat keyakinan majelis hakim untuk memutuskan bahwa telah terjadi tindak pidana perkosaan.

Pembuktian adalah hal yang sangat penting dari sistem peradilan tindak pidana karena untuk menetapkan atau memutuskan hukuman pada seseorang yang diduga melakukan tindak pidana harus memiliki alat bukti yang menguatkan keyakinan hakim dan mengacu pada *asas minimum* paling sedikit harus ada dua alat bukti. Seperti yang di muat dalam Pasal 183 KUHAP yang berbunyi

“Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya”.

Dalam mengungkap tabir gelap kasus Tindak pidana perkosaan yang polisi atau jaksa biasanya meminta bantuan ahli di bidang lain yaitu pada bidang Ilmu kedokteran forensik (dokter kehakiman) biasanya polisi menyuruh korban untuk melakukan Visum.

Visum et Repertum (VER) adalah laporan tertulis (termasuk kesimpulan yakni sebab-sebab perlukaan/kematian), yang di buat oleh dokter berdasarkan sumpah jabatan, mengenai apa yang dilihat/diperiksa berdasarkan keilmuannya , atas permintaan tertulis dari pihak yang berwajib, untuk kepentingan peradilan.⁶

Visum et Repertum di gunakan sebagai pembuktian dalam tindak pidana perkosaan, melalui keterangan-keterangan dan kesimpulan ahli yang termuat dalam *Visum et Repertum*. *Visum et repertum* seharusnya dilakukan seketika mengetahui

⁶Agus Purwadianto,dkk, *Kristal-Kristal Ilmu Kedokteran Forensik* ,Jakarta 1981 Bagian Ilmu Kedokteran Forensik FKUI/LKUI h. 5

telah terjadi tindak pidana terutama yang menyangkut mengenai tubuh dan nyawa manusia mengingat petunjuk bisa saja hilang khususnya pada kasus perkosaan, Visum merupakan bentuk pembuktian materiil dan sebagai alat bukti pendukung yang kuat di sidang pengadilan, sejauh mana kekuatan hukum dari *Visum et Repertum* sebagai alat bukti dalam mengungkap kasus perkosaan di pengadilan karena banyak hal-hal yang mempengaruhinya, yang pertama ketika korban sebelum diperkosa memang sudah tidak perawan atau selaput darah yang rusak karena pernah mengalami kecelakaan sebelumnya, yang kedua pelaku perkosaan sudah berpengalaman sehingga tidak menimbulkan bekas-bekas kekerasan yang mengindikasikan bukti tindak perkosaan bisa saja tidak terlihat hingga menyulitkan polisi untuk menemukan alat bukti, yang ketiga kejadian yang sudah lama baru terungkap karena korban merasa takut dan malu untuk melaporkannya hingga bekas kekerasan bisa menghilang.

Seberapa penting peranan hasil pemeriksaan dari *Visum Et Repertum* dalam pembuktian dan mempengaruhi pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusannya dalam tindak pidana perkosaan. Serta analisis ilmiah secara hukum mengenai peran *Visum et Repertum* dalam pembuktian sebagai alat bukti dalam menjatuhkan suatu putusan.

Berdasarkan uraian diatas membuat penulis tertarik untuk meneliti dan membahas lebih mendalam Kekuatan Hukum *Visum Et Repertum* sebagai alat bukti tindak pidana perkosaan.

B. Fokus Penelitian & Deskripsi Fokus

Dalam penelitian ini yang menjadi fokus penelitian yakni Kekuatan Hukum *Visum et Repertum* sebagai Pembuktian Tindak Pidana Perkosaan, serta analisis

secara pandangan ilmiah pengaruh *visum et repertum* dalam mempengaruhi pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara tindak pidana perkosaan (Studi Kasus di Pengadilan Negeri Sungguminasa).Untuk memberikan arah yang tepat terhadap masalah yang dibahas, penulis berusaha memberikan deskripsi fokus penelitian skripsi ini:

- Kekuatan *n* 1 perihal kuat tt tenaga; gaya ; 2 keteguhan ; kekukuhan: marilah kita sama-sama berdoa agar diberi- *batin*⁷.
- Hukum adalah ketentuan-ketentuan yang timbul dari pergaulan hidup manusia⁸
- *Visum et Repertum* adalah laporan tertulis (termasuk kesimpulan yakni sebab-sebab perlukaan/kematian), yang di buat oleh dokter berdasarkan sumpah jabatan, mengenai apa yang dilihat/diperiksa berdasarkan keilmuannya , atas permintaan tertulis dari pihak yang berwajib, untuk kepentingan peradilan⁹
- Pembuktian adalah perbuatan membuktikan. Membuktikan berarti memberi atau memperlihatkan bukti, melakukan sesuatu sebagai kebenaran, melaksanakan, menandakan, menyaksikan dan meyakinkan.¹⁰

⁷ *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa Edisi Keempat* PT.Gramedia Pustaka Utama 2008

⁸R.Abdoel Djamali ,*Pengantar Hukum Indonesia* Edisi Revisi (Jakarta:PT RajaGrafindo Persada 2012) h1

⁹, Agus Purwadianto,dkk, *Kristal-Krital Ilmu Kedokteran Forensik* , (Jakarta 1981 Bagian Ilmu Kedokteran Forensik FKUI/LKUI) h. 5

¹⁰ Eddy O.S Hiariej ,*Teori& Hukum Pembuktian* (Jakarta:Penerbit Erlangga, 2012),h 3

- Tindak Pidana ialah suatu perbuatan atau rangkaian perbuatan yang dapat di kenakan hukuman pidana¹¹
- Perkosaan (*Verktachting*) dalam hal persetubuhan di muat dalam pasal 285 yang rumusannya sebagai berikut “Barang siapa dengan kekerasan atau ancama kekerasan memaksa seseorang bersetubuh dengan dia di luar perkawinan, diancam karena melakukan perkosaan dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun”¹²

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, dapat diajukan pokok permasalahan yang dirumuskan penulis adalah Kekuatan Hukum *Visum et Repertum* sebagai pembuktian tindak pidana perkosaan. Dari pokok masalah tersebut penulis merumuskan sub permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana aturan hukum tentang *Visum et Repertum* sebagai pembuktian dalam tindak pidana perkosaan di Pengadilan Negeri Sungguminasa?
2. Bagaimana pengaruh *Visum et Repertum* terhadap pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan di Pengadilan Negeri Sungguminasa?

D. Kajian pustaka

Dalam penyusunan skripsi dibutuhkan berbagai dukungan teori dari berbagai sumber atau rujukan yang mempunyai relevansi terhadap rencana penelitian. Sebelum melakukan penelitian penulis telah melakukan kajian terhadap karya-karya

¹¹ R.Abdoel Djamali , *Pengantar Hukum Indonesia* Edisi Revisi (Jakarta :PT RajaGrafindo Persada 2012) h 175

¹² Adami Chazawi , *Tindak Pidana mengenai kesopanan* (Jakarta:PT Rajagrafindo persada 2007) h 63

ilmiah yang berkaitan dengan pembahasan ini. Adapun penelitian yang memiliki relevansi dengan judul penulis, sebagai berikut:

Adami Chazawi dalam bukunya Tindak Pidana Mengenai Kesopanan dimana dalam buku ini memuat masalah kejahatan perkosaan yang meliputi; Istilah dan pengertian perkosaan, untuk memahami unsur perkosaan, namun tidak membahas mengenai pembuktian tindak pidana perkosaan lebih jauh.

Agus Purwanto, Budi Sampurna, Herkutanto dalam bukunya Kristal-Kristal Ilmu Kedokteran Forensik dimana dalam buku ini membahas masalah meliputi; Definisi, prosedur dan jenis *Visum et Repertum*, Bagian-Bagian *Visum et Repertum* Kekuatan/daya bukti *Visum et Repertum* namun hanya membahas secara umum soal visum tidak membahas secara khusus dari pembuktian visum pada perkosaan

Eddy O.S.Hiariej dalam bukunya Teori & Hukum Pembuktian buku ini megulas mengenai beberapa istilah dan arti penting pembuktian. Karakter dan parameter pembuktian, asas terkait pembuktian, menguraikan mengenai alat bukti, mengulas pembuktian pidana di Indonesia. Tidak membahas spesifik kedudukan pembuktian *Visum et Repertum* .

E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian yang ingin dicapai adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui bagaimana aturan hukum tentang *Visum et Repertum* sebagai pembuktian tindak pidana perkosaan.
- b. Untuk mengetahui bagaimana pengaruh *Visum et Repertum* terhadap pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan.

2. Kegunaan Penelitian

Hasil dari penelitian ini diharapkan bisa memberikan kontribusi tentang kekuatan hukum dari visum sebagai alat bukti dalam tindak pidana perkosaan. Adapun secara detail kegunaan tersebut diantaranya sebagai berikut:

- a. Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan/referensi dalam mengembangkan teori/konsep dan ilmu pengetahuan khususnya dalam bidang ilmu hukum.
- b. Dapat memberikan masukan serta dijadikan dasar informasi bagi masyarakat untuk lebih jauh menggali permasalahan dan pemecahan masalah yang ada relevansinya dengan hasil penelitian ini.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Tentang Tindak Pidana

1. Pengertian Tindak Pidana

Istilah tindak pidana berasal dari istilah yang dikenal dalam hukum pidana Belanda yaitu *Strafbaar feit*. Walaupun istilah ini terdapat dalam WvS Belanda, dengan demikian juga WvS Hindia Belanda (KUHP), tetapi juga tidak ada penjelasan resmi tentang apa yang dimaksud dengan *Strafbaar feit* itu. Oleh karena itu, para ahli hukum berusaha untuk memberikan arti dan isi dari istilah itu. Sayangnya sampai kini belum ada keseragaman pendapat.¹

Secara *literlijk*, kata “*straf*” artinya pidana, “*baar*” artinya dapat atau boleh dan “*feit*” adalah perbuatan. Dalam kaitannya dengan istilah *Strafbaar feit* secara itu, ternyata *straf* di terjemahkan juga dengan kata hukum. Padahal sudah lazim hukum itu adalah terjemahan dari kata *recht*, seolah-olah arti *straf* sama dengan *recht*, yang sebenarnya tidak demikian halnya.²

Beberapa definisi lainnya tentang tindak pidana, antara lain;

- a. Menurut Wirjono Prodjodikoro, “tindak pidana berarti suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman pidana
- b. Menurut D.Simons, tindak pidana (*strafbaar feit*) adalah kelakuan (*handeling*) yang diancam dengan pidana yang bersifat melawan hukum, yang berhubungan dengan kesalahan dan yang dilakukan oleh orang yang mampu bertanggungjawab (*eene strafbaar gestelde “onrechtmatige, met ashuldnnin verband staande handeling van een toerekeningsvatbaar person”*)

¹ Adami Chazawi *Pelajaran Hukum pidana Bagian 1* (Jakarta :PT RajaGrafindo Persada, 2005) h 67

² Adami Chazawi *Pelajaran Hukum pidana Bagian 1* (Jakarta :PT RajaGrafindo Persada, 2005) h 69

- c. Menurut G.A Van Hamel, sebagaimana yang di terjemahkan oleh Moeljatno, “*strafbaar feit*” adalah kelakuan orang (*menselijke gedraging*) yang dirumuskan dalam *wet*, bersifat melawan hukum, yang patut dipidana (*strafwaardig*) dan dilakukan dengan kesalahan.³

Moeljatno menggunakan istilah perbuatan pidana, yang didefinisikan beliau sebagai “perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa melanggar larangan tersebut”⁴

Pengertian tindak pidana (*strafbaarfeit/delict/criminal act*) yang selama ini dikembangkan oleh doktrin, dirumuskan secara tegas dalam RUU. Pasal 11 ayat (1) menetapkan bahwa :“ tindak pidana adalah perbuatan melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang oleh peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana”.⁵

Menurut Chairul Chuda Tindak pidana adalah perbuatan atau serangkaian perbuatan yang padanya dilekatkan sanksi pidana. Selanjutnya, menurut Chairul Chuda bahwa dilihat dari istilahnya, hanya sifat-sifat dari perbuatan saja yang meliputi suatu tindak pidana. Sedangkan sifat-sifat orang yang melakukan tindak pidana tersebut menjadi bagian dari persoalan lain, yaitu pertanggungjawaban pidana.

2. Unsur-Unsur Perbuatan Pidana

Pada hakikatnya, setiap perbuatan pidana harus terdiri dari unsur-unsur lahiriah(fakta) oleh perbuatan, mengandung kelakuan dan akibat yang ditimbulkan karenanya. Keduanya memunculkan kejadian dalam alam lahir

³ Frans Maramis, *Hukum Pidana Umum dan Tertulis di Indonesia* (Jakarta:Rajawali Pers, 2013) h 58

⁴ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum pidana Bagian 1* (Jakarta:PT RajaGrafindo Persada, 2005) h 71

⁵ M.Ali Zaidan, *Menuju Pembaharuan Hukum Pidana* (Jakarta:Sinar Grafika 2015) h 370

(dunia)⁶

Menurut Moeljatno yang merupakan unsur atau perbuatan pidana adalah

- a. Kelakuan dan akibat (=perbuatan)
- b. Hal ikhwal atau keadaan yang menyertai perbuatan
- c. Keadaan tambahan yang memberatkan pidana.
- d. Unsur melawan hukum yang objektif.
- e. Unsur melawan hukum yang subjektif.

Perlu ditekankan lagi bahwa sekalipun dalam rumusan delik tidak terdapat unsur melawan hukum, namun jangan dikira bahwa perbuatan tersebut lalu tidak bersifat melawan hukum. Sebagaimana ternyata diatas, perbuatan tadi sudah demikian wajar sifat melawan hukumnya, sehingga tidak perlu untuk dinyatakan tersendiri.

Sungguh pun demikian setiap tindak pidana yang terdapat dalam kitab undang-undang hukum pidana itu pada umumnya menurut doktrin, unsur-unsur delik atau perbuatan pidana terdiri atas unsure subjektif dan unsure objektif. Terhadap unsur-unsur tersebut dapat diutrakan sebagai berikut :⁷

1. Unsur subjektif

Unsur subjektif adalah unsur yang berasal dari dalam diri pelaku. Asas hukum pidana menyatakan *Ant act does not make a person guilty unless the mind is guilty or actus non facit reum nisi mens sit rea* (tidak ada hukuman, kalau tidak ada kesalahan). Kesalahan yang di maksud disini adalah kesalahan yang diakibatkan oleh kesengajaan (*intention/opzet/dolus*) dan kealpaan (*negligence or schuld*) pada umumnya para pakar telah menyetujui bahwa “kesengajaan” terdiri atas tiga yakni:

⁶ Rahman Syamsuddin dan Ismail Aris, *Merajut Hukum Di Indonesia* (Jakarta :Mitra Wacana Media 2014) h 193

⁷ Rahman Syamsuddin dan Ismail Aris, *Merajut Hukum Di Indonesia* (Jakarta :Mitra Wacana Media 2014) h 193-194

- 1) Kesengajaan sebagai yang dimaksud (*oogmerk*)
- 2) Kesengajaan dengan keinsafan pasti (*opzet als zekerheidsbewustzijn*)
- 3) Kesengajaan keinsafan dengan keinsafan akan kemungkinan (*dolus eventualis*)

Sedangkan kealpaan terdiri atas dua yaitu:

- 1) Tak berhati-hati;
- 2) Dapat menduga akibat perbuatan itu.

2. Unsur Objektif

Unsur objektif merupakan unsur dari luar diri pelakuyang terdiri atas :⁸

- a. Perbuatan manusia, berupa:
 - 1) *Act* yakni perbuatan aktif atau perbuatan positif;
 - 2) *Omission*, yakni perbuatan pasif atau perbuatan negative, yaitu perbuatan yang mendiamkan atau membiarkan
- b. Akibat (*result*) perbuatan manusia
 Akibat tersebut membahayakan atau merusak, bahkan menghilangkan kepentingan-kepentingan yang dilindungi oleh hukum, misalnya nyawa, badan, kemerdekaan, kehormatan, dsb.
- c. Keadaan-keadaan (*circumstances*)
 Pada umumnya , keadaan tersebut dibedakan antara lain :
 - 1) Keadaan pada saat perbuatan dilakukan;
 - 2) Keadaan setelah perbuatan dilakukan.
- d. Sifat dapat dihukum dan sifat melawan hukum
 Sifat dapat dihukum berkenaan dengan alasan-alasan membebaskan si pelaku dari hukuman. Adapun sifat melawan hukum adalah perbuatan itu bertentangan dengan hukum, yakni berkenaan dengan larangan atau

⁸ Rahman Syamsuddin dan Ismail Aris, *Merajut Hukum Di Indonesia* (Jakarta : Mitra Wacana Media, 2014) h 194

perintah melakukan sesuatu.⁹

3. Jenis-Jenis Tindak Pidana

Tindak pidana dapat dibeda-bedakan atas dasar-dasar tertentu sebagai berikut.

1. Menurut sistem KUHP, dibedakan antara kejahatan (*misdrijf*) di muat dalam buku II dan pelanggaran (*overtredingen*) dimuat dalam buku III;
2. Menurut cara merumuskannya, dibedakan antara tindak pidana formil (*formeel delicten*) dan tindak pidana materiil (*materiël delicten*);
3. Berdasarkan bentuk kesalahannya, dibedakan antara tindak pidana sengaja (*dolus delicten*) dan tindak pidana tidak dengan sengaja (*culpose delicten*);
4. Berdasarkan macam perbuatannya, dapat dibedakan antara tindak pidana aktif/positif dapat juga disebut tindak pidana komisi (*delicta commissions*) dan tindak pidana pasif/negative, disebut juga tindak pidana omisi (*delicta omissions*);
5. Berdasarkan saat dan jangka waktu terjadinya, maka dapat dibedakan antara tindak pidana terjadi seketika dan tindak pidana terjadi dalam waktu yang lama atau berlangsung lama/berlangsung terus
6. Berdasarkan sumbernya, dapat dibedakan antara tindak pidana umum dan tindak pidana khusus;
7. Dilihat dari sudut subjek hukumnya, dapat dibedakan antara tindak pidana communia (*delicta communia*, yang dapat dilakukan oleh siapa saja), dan tindak pidana propria (dapat dilakukan oleh orang memiliki kualitas pribadi tertentu)
8. Berdasarkan perlu tidaknya pengaduan dalam hal penuntutan, maka dibedakan antara tindak pidana biasa (*gewone delicten*) dan tindak pidana aduan (*klacht delicten*);

⁹ Rahman Syamsuddin dan Ismail Aris, *Merajut Hukum Di Indonesia* (Jakarta :Mitra Wacana Media 2014) h 195

9. Berdasarkan berat ringannya pidana yang diancamkan, maka dapat dibedakan antara tindak pidana pokok (*eenvoudige delicten*), tindak pidana diperberat (*gequalificeerde delicten*) dan tindak pidana yang diperingan (*geprivilegieerde delicten*);
10. Berdasarkan kepentingan hukum yang dilindungi, maka tindak pidana tidak terbatas macamnya bergantung dari kepentingan hukum yang dilindungi, seperti tindak pidana terhadap nyawa dan tubuh, terhadap harta benda, tindak pidana pemalsuan, tindak pidana terhadap nama baik, terhadap kesusilaan dan lain sebagainya.
11. Dari sudut berapa kali perbuatan untuk menjadi suatu larangan dibedakan antara tindak pidana tunggal (*enkelvoudige delicten*) dan tindak pidana berangkai (*samengestelde delicten*).¹⁰

B. Tinjauan Tentang Tindak Pidana Perkosaan

1. Pengertian Tindak Pidana Perkosaan

Perkosaan berasal dari kata latin “*rapere*” yang berarti mencuri, merampas atau membawa pergi. Pada perkosaan, korban diperlakukan sebagai objek dan bukan sebagai individu, sehingga terjadi kehilangan diri dan kepercayaan diri.

Tindak pidana perkosaan atau *vekracting* oleh pembentuk undang-undang telah diatur dalam Pasal 285 KUHP, yang rumusan aslinya di dalam bahasa belanda berbunyi sebagai berikut :

Hij die door geweld of bedreiging met geweld eene vrouw dwingt met hem buiten echt vleeselijke gemeenschap te hebben, wordt, als schuldig aan verkracting, gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste twaalf jaren

Artinya:

“Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa

¹⁰ Adami Chazawi *Pelajaran Hukum pidana Bagian 1* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2005) h 121-122

seseorang wanita mengadakan hubungan kelamin di luar pernikahan dengan dirinya, karena bersalah melakukan perkosaan pidana dengan pidana penjara penjara paling lama dua belas tahun”¹¹

Menurut Wirjono, kata perkosaan sebagai terjemahan dari kualifikasi aslinya (Belanda), yakni *verkrachting* tidaklah tepat karena istilah perkosaan menggambarkan secara tepat tentang perkosaan arti yang sebenarnya dari kualifikasi *verkrachting*, yakni perkosaan untuk bersetubuh. Oleh karena itu menurut beliau kualifikasi yang tepat untuk pasal 285 ini adalah perkosaan untuk bersetubuh.

Apabila rumusan perkosaan di atas dirinci, terdiri dari unsur-unsur sebagai berikut.

- a. Perbuatan : memaksa;
- b. Caranya :
 - 1) dengan kekerasan;
 - 2) ancaman kekerasan;
- c. Objek: seorang perempuan bukan istrinya;
- d. Bersetubuh dengan dia

Pengertian perbuatan memaksa (*dwingen*) adalah perbuatan yang di tujukan pada orang lain dengan menekan kehendak orang lain yang bertentangan dengan kehendak orang lain itu agar orang lain tadi menerima kehendak orang yang menekan atau sama dengan kehendaknya sendiri. Menerima kehendaknya ini setidaknya ada dua macam, yaitu:

- 1) Menerima apa yang akan diperbuat terhadap dirinya; atau

¹¹ P.A.F Lamintang ,Theo Lamintang, *Delik-Delik Khusus Kejahatan Melanggar Norma Kesusilaan & Norma Keadilan* (Jakarta:Sinar grafiika,2009) h 96

- 2) Orang yang di paksa berbuat sama yang sama sesuai dengan apa yang di kehendaki orang yang memaksa.¹²

Walaupun dalam rumusannya, undang-undang tidak mensyaratkan keharusan adanya unsur kesengajaan pada diri pelaku dalam melakukan perbuatan yang dilarang di dalam Pasal 285 KUHP, tetapi dengan di cantumkan unsur memaksa di dalam rumusan ketentuan pidana yang diatur dalam Pasal 285 KUHP, kiranya sudah jelas bahwa tindak pidana perkosaan seperti yang dimaksudkan dalam Pasal 285 itu harus dilakukan dengan sengaja.¹³

Untuk dapat menyatakan seseorang terdakwa yang di dakwa melanggar larangan yang diatur dalam Pasal 285 KUHP terbukti mempunyai kesengajaan melakukan tindak pidana perkosaan, di sidang pengadilan yang memeriksa dan mengadili perkara terdakwa, baik penuntut umum maupun hakim harus dapat membuktikan tentang :

- a. Adanya kehendak atau maksud terdakwa memakai kekerasan;
- b. Adanya kehendak atau maksud terdakwa untuk mengancam akan memakai kekerasan;
- c. Adanya kehendak atau maksud terdakwa untuk memaksa;¹⁴
- d. Adanya pengetahuan terdakwa bahwa yang di paksa itu adalah seorang wanita yang bukan istrinya;

¹² Adami Chazawi, *Tindak Pidana mengenai kesopanan* (Jakarta:PT Rajagrafindo persad,a 2007) h 63

¹³ P.A.F Lamintang dan Theo Lamintang, *Delik-delik Khusus Kejahatan Melanggar Noma Kesusilaan & Norma Kepatuhan* Jakarta 2009 h 97

¹⁴ P.A.F Lamintang, Theo Lamintang, *Delik-delik Khusus Kejahatan Melanggar Noma Kesusilaan & Norma Kepatuhan* Jakarta 2009 h 97

- e. Adanya pengetahuan pada terdakwa bahwa yang di paksa untuk melakukan oleh wanita tersebut ialah untuk mengadakan hubungan kelamin dengan dirinya di luar perkawinan.

Jika salah satu dari kehendak atau maksud dan pengetahuan terdakwa ternyata tidak dapat di buktikan, maka tidak ada alasan bagi penuntut umum untuk menya takan terdakwa terbukti mempunyai kesengajaan melakukan tindak pidana yang di dakwakan kepadanya, dan hakim akan memberikan putusan bebas dari tuntutan hukum bagi terdakwa.

Unsur objektif pertama dari tindak pidana perkosaan yang diatur dalam pasal 285 ialah unsur barangsiapa.

Kiranya sudah cukup jelas bahwa kata barangsiapa menunjukkan orang, yang apabila orang tersebut memenuhi semua unsur dari tindak pidana yang diatur dalam pasal 285 KUHP, maka ia di sebut sebagai pelaku dari tindak pidana perkosaan tersebut.

Unsur objektif kedua adalah dari tindak pidana yang diatur dalam pasal 285 KUHP ialah unsur dengan kekerasan.

Undang-undang tidak menjelaskan tentang apa sebenarnya dimaksudkan dengan kekerasan, bahkan di dalam yurisprudensi pun tidak di jumpai adanya putusan kasasi yang dapat dipakai sebagai pedoman untuk memberikan arti setepat-tepatnya bagi kata kekerasan tersebut.

Menurut Simons, yang dimaksudkan dengan kekerasan atau *geweld* ialah *elke uitefening van lichamelijke kracht van niet al te geringe betekenis*. Artinya , setiap penggunaan tenaga badan yang tidak terlalu tidak berarti atau *het aanwenden van lichamelijke kracht van niet al te geringe intensiteit*, artinya

setiap pemakaian tenaga yang tidak terlalu ringan.

Unsur objektif ketiga dari tindak pidana yang diatur dalam pasal 285 KUHP ialah unsur dengan ancaman akan memakai kekerasan.¹⁵

Tentang apa yang dimaksudkan dengan ancaman akan memakai kekerasan itu pun, undang-undang ternyata tidak memberi penjelasannya.

Menurut Hoge Raad dalam arrest-arrest-nya masing-masing tanggal 5 januari 1914, NJ 1914 halaman 397, W. 9604 Tanggal 18 Oktober 1915, NJ 1915 1116, mengenai ancaman akan kekerasan tersebut diisyaratkan yakni :

- a. Bahwa ancaman itu harus diucapkan dalam sedemikian rupa, sehingga dapat menimbulkan kesan pada orang yang diancam, bahwa yang diancamkan itu benar-benar akan dapat merugikan kebebasan pribadinya;
- b. Bahwa maksud pelaku memang telah di tujukan untuk menimbulkan kesan seperti itu.

Dari arrest-arrest Hoge Raad tersebut, orang belum dapat memperoleh penjelasan tentang apa yang sebenarnya dimaksudkan dengan ancaman dengan kekerasan atau ancaman akan memakai, karena arrest-arrest tersebut hanya menjelaskan tentang caranya ancaman itu harus diucapkan.

Karena kekerasan tidak hanya dapat dilakukan dengan memakai tenaga badan sifatnya tidak terlalu ringan, yakni seperti yang dikatakan Simons, melainkan juga dapat dilakukan dengan memakai sebuah alat, sehingga tidak diperlukan adanya pemakaian tenaga badan yang kuat, misalnya menembak

¹⁵ P.A.F Lamintang, Theo Lamintang, *Delik-delik Khusus Kejahatan Melanggar Noma Kesusilaan & Norma Kepatuhan* Jakarta 2009 h 98

dengan senjata api, menjerat leher dengan seutas tali, menusuk dengan sebilah pisau dan lain-lainnya, maka ancaman akan memakai kekerasan itu harus diartikan sebagai ancaman, yang apabila yang diancam tidak bersedia memenuhi keinginan pelaku untuk mengadakan hubungan kelamin dengan pelaku, maka ia akan dapat berakibat merugikan kebebasan, kesehatan atau keselamatan nyawa orang yang diancam.¹⁶

Unsur objektif keempat dari tindak pidana yang diatur pasal 285 KUHP ialah unsur memaksa.

Perbuatan memaksa dapat dilakukan dengan perbuatan dan dapat juga dilakukan dengan ucapan. Perbuatan membuat seorang wanita menjadi terpaksa bersedia mengadakan hubungan kelamin, harus dimasukkan dalam pengertian memaksa seorang wanita mengadakan hubungan kelamin, walaupun yang menanggalkan semua pakaian yang dikenakan oleh wanita itu adalah wanita itu sendiri.¹⁷

Dalam hal ini kiranya sudah jelas, bahwa keterpaksaan wanita tersebut harus merupakan akibat dari dipakainya kekerasan akan dipakainya ancaman akan memakai kekerasan oleh pelaku atau oleh salah seorang dari para pelaku.

Unsur objektif kelima dari tindak pidana diatur dalam pasal 285 KUHP ialah seorang wanita.

Perlu diketahui bahwa bagi kejahatan terhadap kesusilaan, KUHP telah

¹⁶P.A.F Lamintang, Theo Lamintang, *Delik-delik Khusus Kejahatan Melanggar Noma Kesusilaan & Norma Kepatuhan* Jakarta 2009 h 99-100

¹⁷P.A.F Lamintang, Theo Lamintang, *Delik-delik Khusus Kejahatan Melanggar Noma Kesusilaan & Norma Kepatuhan* Jakarta 2009 h 100

menyebutkan adanya berbagai wanita, masing-masing yakni : a. wanita belum mencapai usia dua belas tahun (Pasal 287 ayat (2) KUHP) wanita yang belum mencapai usia lima belas tahun (Pasal 297 ayat (1) KUHP dan pasal 290 angka 3 KUHP), wanita yang belum dapat di nikahi (Pasal 288 ayat (1) KUHP), dan wanita pada umumnya.

Adapun yang dimaksudkan dalam pasal 285 KUHP ialah wanita pada umumnya.

Hal ini juga telah dibenarkan oleh Hoge Raad dalam arrest-nya tanggal 14 Maret 1938, NJ 1038 No. 956 yang antara lain telah memutuskan sebagai berikut :

De enkele omstandigheid dat Sr. 244 een vrouwelijk person beneden 12 jaar meisje noemt, brengt niet mede dat vrouw in Sr. 242, dat geen leeftijdsgrens aangeeft, is beperkt tot vrouwelijke personen van 12 jaar en ouder. Dit misdrijf kan derhalve ook worden gepleegd tegen een meisje beneden 12 jaar.

Artinya :

Satu-satunya alasan yakni karena di dalam Pasal 287 ayat (2) wanita di bawah usia dua belas tahun itu disebut gadis tidak berarti bahwa di dalam pasal 285 tidak disebutkan batas usia, maka pengertian wanita dalam pasal 285 itu harus dibatasi pada wanita yang telah berusia 12 tahun ke atas. Oleh karena itu, kejahatan yang diatur dalam pasal 285 itu juga dapat dilakukan terhadap seorang gadis di bawah usia 12 tahun.

Unsur objektif keenam dari tindak pidana perkosaan yang diatur dalam pasal 285 KUHP ialah unsur mengadakan hubungan kelamin di luar perkawinan.¹⁸

Dalam arrest-nya tanggal 5 Februari 1912, W. 9292, Hoge Raad antara

¹⁸ P.A.F Lamintang, Theo Lamintang, *Delik-delik Khusus Kejahatan Melanggar Noma Kesusilaan & Norma Kepatuhan* Jakarta Sinar Grafika 2009 h 101

lain telah memutuskan bahwa :

Een bloot uitwendige aanrakingder geslachtsdelen van man en vrouw is niet de vereniging van die delen, die voor verkrachting nodig is.

Artinya :

Suatu persinggungan di luar antara kelamin pria dan wanita itu bukan merupakan persatuan antara alat-alat kelamin tersebut, yang di perlukan dalam suatu perkosaan.

Dari pembicaraan diatas, kiranya sudah cukup jelas bahwa yang di kehendaki oleh undang-undang di dalam ketentuan pidana yang diatur dalam pasal 285 KUHP sebenarnya ialah timbulnya akibat berupa dimasukkannya penis kedalam vagina korban. Atau dengan kata lain, tindak pidana perkosaan yang di atur dalam pasal 285 KUHP sebenarnya adalah delik materiil, yang baru dapat di pandang sebagai telah selesai dilakukan oleh pelaku, jika akibat tersebut ternyata telah terjadi.¹⁹

Unsur objektif ketujuh dari tindak pidana perkosaan yang diatur dalam pasal 285 KUHP ialah unsur dengan dirinya.

Yang di maksud dengan kata-kata “dengan dirinya” ialah diri orang yang dengan kekerasan atau dengan ancaman akan memakai kekerasan telah memaksa korban untuk mengadakan hubungan di luar perkawinan.²⁰

2. Jenis Tindak Pidana Perkosaan

a. Pengaturan Tindak Pidana Perkosaan dalam KUHP

Tindak pidana perkosaan di dalam KUHP termasuk ke dalam

¹⁹ P.A.F Lamintang, Theo Lamintang, *Delik-delik Khusus Kejahatan Melanggar Noma Kesusilaan & Norma Kepatuhan* Jakarta 2009 h 102

²⁰ P.A.F Lamintang, Theo Lamintang, *Delik-delik Khusus Kejahatan Melanggar Noma Kesusilaan & Norma Kepatuhan* Jakarta 2009 h 105

kejahatan kesusilaan. Kejahatan perkosaan diatur dalam Buku II KUHP yang dijabarkan dalam beberapa pasal. Kata perkosaan hanya akan ditemukan dalam bunyi Pasal 285 KUHP. Kejahatan ini menurut KUHP hanya dapat dilakukan oleh laki-laki sebagai pelakunya. Dibentuknya peraturan di bidang ini, ditunjukkan untuk melindungi kepentingan hukum perempuan.²¹

Adapun pasal-pasal yang mengatur tindak pidana perkosaan sebagaimana yang tercantum dalam KUHP, adalah sebagai berikut :

1) Pasal 285 KUHP

Rumusan tentang tindak pidana perkosaan yang di atur di dalam Pasal 285 KUHP secara lengkap berbunyi sebagai berikut :

“Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia di luar perkawinan, diancam karena melakukan perkosaan dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun”²²

Unsur-unsur dari Pasal 285 ini adalah :

- a) Perbuatannya : memaksa bersetubuh
- b) Caranya : dengan kekerasan atau ancaman kekerasan
- c) Objek : perempuan bukan istrinya.

Pengertian perbuatan memaksa (*dwingen*) adalah perbuatan yang ditujukan pada orang lain dengan menekan kehendak orang tersebut yang bertentangan dengan kehendak hatinya agar dirinya menerima kehendak orang yang menekan atau sama dengan kehendaknya sendiri. Menerima kehendaknya ini setidaknya mengakibatkan dua hal yaitu orang yang dipaksa akan menerima apa yang akan diperbuat terhadap dirinya atau orang yang dipaksa tersebut

²¹ <http://rahmanamin1984.blogspot.co.id/2015/01/kebijakan-hukum-pidana-tindak-pidana.html>
di akses pada pukul 11 : 37 WITA 28 Nov 2016

²² Republik Indonesia, *Undang-Undang RI No.8 Tahun 1981 Tentang Acara Pidana* Bab XIV Laksana 2014 h 497

akan berbuat yang sama sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh orang yang memaksa.²³

2) Pasal 286 KUHP

Rumusan tentang tindak pidana perkosaan yang di atur di dalam Pasal 286 KUHP secara lengkap berbunyi sebagai berikut :

“Barang siapa bersetubuh seorang wanita di luar perkawinan, padahal diketahuinya bahwa wanita itu dalam keadaan pingsan atau tidak berdaya, diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun”.²⁴

3) Pasal 287 KUHP

Rumusan tentang tindak pidana perkosaan yang di atur di dalam Pasal 287 KUHP secara lengkap berbunyi sebagai berikut :

(1) Barang siapa bersetubuh dengan seorang wanita di luar perkawinan, padahal diketahuinya atau sepatutnya harus di duganya bahwa umurnya belum lima belas tahun, atau kalau umurnya tidak jelas, bahwa belum waktunya untuk dikawin, diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun.

(2) Penuntutan hanya dilakukan atas pengaduan, kecuali kalau umur perempuan itu belum sampai dua belas tahun atau jika ada salah satu hal berdasarkan pasal 291 dan pasal 294.²⁵

Berbeda dengan Pasal 285 KUHP dan Pasal 286 KUHP yang mensyaratkan tidak adanya persetujuan dari perempuan korban, melalui tindakan pemaksaan berupa kekerasan atau ancaman kekerasan, maka pada pasal 287 KUHP, persetubuhan yang dilakukan adalah dengan persetujuan dari si perempuan korban. Dengan kata lain hubungan tersebut dilakukan dengan suka sama suka. Letak pidananya adalah

²³ Adami Chazawi, *Tindak pidana Mengenai Kesopanan*, (Jakarta:Raja Grafindo Persada, 2005) h 63

²⁴ Republik Indonesia, *Undang-Undang RI No.8 Tahun 1981 Tentang Acara Pidana* Bab XIV Laksana 2014 h 497

²⁵ Republik Indonesia, *Undang-Undang RI No.8 Tahun 1981 Tentang Acara Pidana* Bab XIV Laksana 2014 h 497

pada umur perempuan korban yang belum cukup 15 tahun atau belum masanya untuk dikawin.²⁶

4. Pasal 288 KUHP

Rumusan tentang tindak pidana perkosaan yang di atur di dalam Pasal 288 KUHP secara lengkap berbunyi sebagai berikut :

- 1) Barang siapa dalam perkawinan bersetubuh dengan seorang wanita yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduganya bahwa yang bersangkutan belum waktunya untuk di kawin, apabila perbuatan mengakibatkan luka-luka diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun.
- 2) Jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat, di jatuhkan pidana penjara paling lama delapan tahun
- 3) Jika mengakibatkan mati, dijatuhkan pidana penjara paling lama dua belas tahun.²⁷

Pada dasarnya KUHP tidak mengancam pidana kepada pelaku yang menyetubuhi perempuan yang belum berumur 15 tahun jika perempuan itu adalah istrinya, kecuali dari perbuatan persetubuhan tersebut menimbulkan akibat luka-luka, luka berat atau kematian. Yang dilarang dalam pasal ini bukanlah bersetubuh dengan istrinya yang belum masanya buat dikawinkan, melainkan bersetubuh yang mengakibatkan istrinya yang belum masanya untuk kawin tersebut mengalami luka-luka secara fisik, luka berat ataupun meninggal dunia²⁸

²⁶ Adami Chazawi, *Tindak Pidana Mengenai Kesopanan*, , Jakarta 2005 h 71

²⁷ Republik Indonesia, *Undang-Undang RI No.8 Tahun 1981 Tentang Acara Pidana* Bab XIV Laksana 2014 h 497

²⁸ R Soesilo *Kitab Undang-undang Hukum pidana Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, (Bogor:Politea 1994) h 212

b. Pengaturan Tindak Pidana Perkosaan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak

Perkosaan juga diatur secara khusus dalam undang-undang perlindungan anak dengan ancaman yang lebih berat.

Pada Pasal 76D yang berbunyi :

“Setiap orang dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain”²⁹

Pasal 81 ayat (1) :

“Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76D di pidana dengan pidana penjara paling singkat 5 tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp.5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah)”³⁰

Berdasarkan rumusan Pasal 81 UU No. 23 tahun 2014, maka unsur-unsur yang harus dipenuhi dalam menerapkan kekerasan seksual terhadap anak adalah :

- a. Adanya kekerasan atau ancaman kekerasan.
- b. Adanya tipu muslihat
- c. Adanya serangkaian kebohongan.
- d. Adanya bujukan
- e. Adanya persetubuhan dengan seorang anak.

Jika dibandingkan dengan rumusan yang dikemukakan dalam Pasal 287 KUHP maka cara-cara yang dilarang dalam Pasal 81 ini jauh lebih lengkap karena merumuskan beberapa perbuatan selain kekerasan atau ancaman kekerasan sebagai cara untuk memaksa seseorang anak bersetubuh, yaitu dengan mengakui adanya cara-cara lain yang dapat digunakan seperti

²⁹ Republik Indonesia, *Undang-Undang RI No.35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak* Bab XIA pasal 76D Sinar Grafika h 36

³⁰ Republik Indonesia, *Undang-Undang RI No.35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak* Bab XIA pasal 81 Sinar Grafika h 39

melalui tipu muslihat, serangkaian kebohongan ataupun bujuk rayu. Bahwa apabila salah satu dari cara-cara tersebut unsurnya terpenuhi dan anak yang dipaksa untuk bersetubuh masih berumur 18 tahun, maka kepada pelaku dapat dijerat dengan Pasal 81 ini.³¹

C. Tinjauan Tentang Pembuktian

1. Pengertian Pembuktian

Dalam kosa kata bahasa Inggris , ada dua kata yang sama-sama di terjemahkan dalam bahasa Indonesia sebagai “bukti”, namun sebenarnya kedua kata tersebut memiliki perbedaan yang cukup prinsip. Pertama kata “*evidence*” dan kedua adalah kata “*proof*”. Kata *evidence* memiliki arti, yaitu informasi yang memberikan dasar-dasar yang mendukung suatu keyakinan bahwa beberapa bagian atau keseluruhan fakta itu benar.³² Sementara itu, *proof* adalah suatu kata dengan berbagai arti. Dalam wacana hukum, kata *proof* mengacu pada hasil suatu proses evaluasi dan menarik kesimpulan terhadap *evidence* atau dapat juga digunakan lebih luas untuk mengacu pada proses itu sendiri. Hal ini secara gamblang di kemukakan oleh Ian dennis :

*“Evidence is information. It is information that provides grounds for belief that a particular fact or set of fact is true. Proof is a term with a variable meaning. In legal discourse it may refer to the outcome of the process of evaluating evidence and drawing inference from it, or it may be used more widely to refer to the process it self and/or to the evidence which is being evaluated”.*³³

Dapatlah di tarik kesimpulan berdasarkan apa yang dikemukakan oleh Dennis bahwa kata *evidence* lebih dekat kepada pengertian kata alat bukti menurut hukum

³¹ Rahman Amin, *Kebijakan Hukum Pidana Tindak Pidana Perkosaan di Indonesia* <http://rahmanamin1984.blogspot.co.id/2015/01/kebijakan-hukum-pidana-tindak-pidana.html> di akses pada pukul 11 : 37 WITA 28 Nov 2016

³² Eddy O.S Hiariej, *Teori&Hukum Pembuktian* (Jakarta:Penerbit Erlangga,2012) h 2

³³ Eddy O.S Hiariej, *Teori&Hukum Pembuktian* Penerbit Erlangga 2012 h 2

positif , sedangkan kata *proof* dapat di artikan sebagai pembuktian yang mengarah pada suatu proses. Menurut Max. Houck, *evidence* atau alat bukti dapat di definisikan sebagai pemberian informasi dalam penyidikan yang sah mengeni suatu fakta yang kurang lebih seperti apa adanya.³⁴

Dalam kamus besar bahasa Indonesia, kata “bukti”- terjemahan dari bahasa belanda, *bewijs*- diartikan sebagai yang menyatakan kebenaran suatu peristiwa. Dalam kamus hukum *bewijs* , diartikan sebagai segala sesuatu yang memperlihatkan kebenaran fakta tertentu atau ketidakbenaran fakta lain oleh pihak dalam perkara pengadilan, guna memberi bahan kepada hakim bagi penilaiannya. Sementara itu, membuktikan berarti memperlihatkan bukti dan pembuktian merupakan suatu proses, perbuatan, atau cara membuktikan. Pengertian bukti, membuktikan, dan pembuktian dalam konteks hukum tidak beda jauh berbeda dengan pengertian pada umumnya.³⁵

Pembuktian adalah perbuatan membuktikan. Membuktikan berarti memperlihatkan bukti, melakukan sesuatu sebagai kebenaran, melaksanakan, menandakan, menyaksikan dan meyakinkan.³⁶

Pengertian pembuktian sebagai ketentuan-ketentuan yang berisi penggarisan dan pedoman tentang cara-cara yang di benarkan undang-undang, membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada mereka. Pembuktian merupakan suatu ketentuan yang mengatur alat-alat bukti yang di benarkan oleh undang-undang yang di gunakan oleh hakim dalam membuktikan kesalahan yang di dakwakan di dalam persidangan, dan tidak di benarkan membuktikan kesalahan terdakwa

³⁴ Eddy O.S Hiariej, *Teori&Hukum Pembuktian* Penerbit Erlangga 2012 h 1-2

³⁵ Eddy O.S Hiariej, *Teori&Hukum Pembuktian* Penerbit Erlangga 2012 h 3

³⁶ Eddy O.S Hiariej, *Teori&Hukum Pembuktian* Penerbit Erlangga 2012 h 2-3

dengan tanpa alasan yuridis dan berdasarkan keadilan.³⁷

2. Paramater Pembuktian

a. *Bewijstheorie*

Bewijstheorie adalah teori pembuktian yang di pakai sebagai dasar pembuktian oleh hakim di pengadilan. Ada empat teori pembuktian. Pertama adalah *positief wettelijke bewijstheorie* yang mana hakim terikat secara positif kepada alat bukti menurut undang-undang. Artinya, jika dalam pertimbangan, hakim telah menganggap terbukti suatu perbuatan sesuai dengan alat-alat bukti yang disebut dalam undang-undang tanpa diperlukan keyakinan, hakim dapat menjatuhkan putusan.³⁸

Kedua, *conviction intime* yang berarti keyakinan semata. Artinya, dalam menjatuhkan putusan, dasar pembuktiannya semata-mata diserahkan kepada keyakinan hakim. Dia tidak terikat kepada alat bukti, namun atas dasar keyakinan yang timbul dari hati nurani dan sifat bijaksana seorang hakim, ia dapat menjatuhkan putusan.³⁹

Ketiga, *conviction raisonee*. Artinya, dasar pembuktian menurut keyakinan hakim dalam batas-batas tertentu atas alasan yang logis. Disini, hakim diberi kebebasan memakai alat-alat bukti disertai dengan alasan yang logis. Dalam konteks hukum acara pidana di Indonesia, *conviction raisonee* di gunakan dalam persidangan tindak pidana ringan, termasuk perkara lalu

³⁷ Syaiful Bakhri, *Hukum Pembuktian Dalam Praktik Peradilan*(Jakarta : P3IH dan Total Media)

³⁸ Eddy O.S Hiariej, *Teori&Hukum Pembuktian* Penerbit Erlangga 2012 h 15

³⁹ Eddy O.S Hiariej, *Teori&Hukum Pembuktian* Penerbit Erlangga 2012 h 16

lintas dan persidangan perkara pidana dalam acara cepat yang tidak membutuhkan jaksa penuntut umum untuk menghadirkan terdakwa, tetapi polisi mendapatkan kuasa dari jaksa penuntut umum dapat menghadirkan terdakwa dalam sidang pengadilan.

Keempat, yang secara umum dianut dalam system peradilan pidana termasuk Indonesia, adalah *negatief wettelijk bewijstheorie*. Dalam pembuktian menurut keyakinan hakim yang timbul dari alat-alat bukti dalam undang-undang secara negatif. Secara tegas pembuktian ini dinyatakan dalam Pasal 183 KUHAP.⁴⁰

b. Bewijsmiddelen

Bewijsmiddelen adalah alat-alat bukti yang di gunakan untuk membuktikan telah terjadinya suatu peristiwa hukum. Mengenai apa saja yang menjadi alat bukti, akan diatur dalam hukum acara.⁴¹

Dalam hukum acara pidana di Indonesia alat bukti yang diakui di pengadilan sama dengan alat bukti yang di gunakan di banyak negara. Berdasarkan pasal 184 KUHAP, alat bukti yang sah dalam hukum acara pidana adalah :

- Keterangan saksi
- Keterangan ahli
- Surat
- Petunjuk

⁴⁰ Eddy O.S Hiariej, *Teori&Hukum Pembuktian* Penerbit Erlangga 2012 h 17

⁴¹ Eddy O.S Hiariej, *Teori&Hukum Pembuktian* Penerbit Erlangga 2012 h 17

- Keterangan terdakwa.⁴²

c. *Bewijsvoering*

Secara harfiah *bewijsvoering* diartikan sebagai sebagai penguraian cara bagaimana menyampaikana alat-alat bukti kepada hakim di pengadilan. Bagi negara-negara cenderung menggunakan due process dalam sistem peradilan pidananya, perihal *bewijsvoering* ini cukup mendapatkan perhatian dalam due process model, negara begitu menjunjung hak asasi manusia (hak-hak tersangka) sehingga acap kali seorang tersangka di bebaskan oleh pengadilan dalam pemeriksaan praperadilan lantaran bukti diperoleh dengan cara yang tidak sah atau yang biasa disebut dengan istilah *unlawful legal evidence*. *Bewijsvoering* ini semata-mata menitikberatkan pada hal-hal formalistis. Konsekuensi selanjutnya sering kali mengesampingkan kebenaran dan fakta yang ada.⁴³

d. *Bewijslast*

Bewijslast atau *burden of proof* adalah pembagian beban pembuktian yang diwajibkan oleh undang-undang untuk membuktikan suatu peristiwa hukum.⁴⁴ Dalam konteks perkara pidana secara universal yang berlaku di dunia, kewajiban untuk membuktikan dakwaan yang di dakwakan kepada tersangka merupakan kewajiban jaksa penuntut umum.⁴⁵

Dalam praktik, baik jaksa penuntut umum maupun terdakwa atau

⁴² Eddy O.S Hiariej, *Teori&Hukum Pembuktian* Penerbit Erlangga 2012 h 18

⁴³ Eddy O.S Hiariej, *Teori&Hukum Pembuktian* Penerbit Erlangga 2012 h 20

⁴⁴ Eddy O.S Hiariej, *Teori&Hukum Pembuktian* Penerbit Erlangga 2012 h 22

⁴⁵ Eddy O.S Hiariej, *Teori&Hukum Pembuktian* Penerbit Erlangga 2012 h 23

penasihat hukumnya saling membuktikan di depan persidangan. Lazimnya jaksa penuntut umum akan membuktikan kesalahan terdakwa, sedangkan sebaliknya terdakwa beserta penasihat hukumnya akan membuktikan sebaliknya bahwa terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan⁴⁶

e. *Bewijskracht*

Bewijskracht dapat diartikan sebagai kekuatan pembuktian masing-masing alat bukti dalam rangkaian penilaian terbuktinya suatu dakwaan. Penilaian tersebut merupakan otoritas hakim. Hakimlah yang menilai dan menentukan kesesuaian antara alat bukti yang satu dengan alat bukti yang lain. Kekuatan pembuktian juga terletak pada bukti yang diajukan, apakah bukti tersebut relevan atau tidak dengan perkara yang sedang di persidangkan. Jika bukti tersebut relevan, kekuatan pembuktian selanjutnya mengarah pada apakah bukti tersebut dapat diterima ataukah tidak.⁴⁷

Dalam hukum acara pidana, kekuatan semua alat bukti pada hakikatnya sama, tidak ada yang melebihi yang lain, tegasnya, alat bukti dalam hukum acara pidana tidak mengenal hirarki.⁴⁸

f. *Bewijs Minimum*

Secara sederhana, *Bewijs Minimum* adalah bukti minimum yang di perlukan dalam pembuktian untuk mengikat kebebasan hakim. Dalam konteks hukum acara pidana di Indonesia , untuk menjatuhkan pidana

⁴⁶ Eddy O.S Hiariej, *Teori&Hukum Pembuktian* Penerbit Erlangga 2012 h 23

⁴⁷ Eddy O.S Hiariej, *Teori&Hukum Pembuktian* Penerbit Erlangga 2012 h 25

⁴⁸ Eddy O.S Hiariej, *Teori&Hukum Pembuktian* Penerbit Erlangga 2012 h 25

terhadap terdakwa, paling tidak harus ada dua alat bukti di tambah keyakinan hakim. Artinya untuk dapat menjatuhkan pidana, *bewijs minimum*-nya adalah dua alat bukti.⁴⁹

3. Sistem Pembuktian yang dianut di Indonesia

Pasal 183 KUHAP;

Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan terdakwalah yang bersalah melakukannya.

Pasal 294 HIR

Tidak akan di jatuhkan hukuman kepada seorangpun jika hakim tidak yakin kesalahan terdakwa dengan upaya bukti menurut undang-undang bahwa benar telah terjadi perbuatan pidana dan bahwa tertuduhlah yang salah melakukan perbuatan tersebut.

Asas minimum pembuktian merupakan prinsip yang mengatur batas yang harus di penuhi untuk membuktikan kesalahan terdakwa yaitu :

- Dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti sah (dengan hanya salah satu alat bukti belum cukup)
- Kecuali dalam pemeriksaan perkara dengan cara pemeriksaan cepat, dengan satu alat bukti sah saja sudah cukup mendukung keyakinan hakim.

Adapun prinsip pembuktian yang di gunakan:

1. Hal yang secara umum sudah di ketahui tidak perlu di buktikan (*notoire feiten*)
2. Satu saksi bukan saksi (*unus testis nullus testis*)

⁴⁹ Eddy O.S Hiariej, *Teori&Hukum Pembuktian* Penerbit Erlangga 2012 h 26

3. Pengakuan (keterangan) terdakwa tidak cukup untuk membuktikan bahwa ia bersalah.

Apabila kita cermati sistematika Kitab Undang-undnag Hukum Acara Pidana (Undang-Undang No.8 Tahun 1981), maka tahapan acara pidana sebagai suatu system adalah :

1. Penyelidikan
2. Penyidikan
3. Prapenuntutan
4. Penuntutan
5. Pemeriksaan di sidang Pengadilan
6. Putusan Pengadilan
7. Upaya Hukum
8. Pelaksanaan Putusan Pengadilan
9. Pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pengadilan⁵⁰

4. Alat Bukti

Dalam QS An-Nisa ayat 135:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِٱلْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلّٰهِ وَلَوْ عَلَىٰ
 أَنفُسِكُمْ أَوِ ٱلْوَالِدَيْنِ وَٱلْأَقْرَبِينَ إِن يَكُنْ غَنِيًّا أَوْ فَكِيرًا فَٱللَّهُ أَوَّلَىٰ بِهِمَا
 فَلَا تَتَّبِعُوا ٱلْهَوَىٰ أَن تَعْدِلُوا وَإِن تَلَوُّا أَوْ تُعْرَضُوا فَإِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِمَا
 تَعْمَلُونَ خَبِيرًا ﴿١٣٥﴾

⁵⁰ Rahman Syamsuddin , *Hukum acara Pidana dalam integrasi keilmuan Makassar* Alauddin University Press 2013 h 135

Terjemahannya:

*135. Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu orang yang benar-benar penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah biarpun terhadap dirimu sendiri atau ibu bapa dan kaum kerabatmu. Jika ia kaya ataupun miskin, maka Allah lebih tahu kemaslahatannya. Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran. Dan jika kamu memutar balikkan (kata-kata) atau enggan menjadi saksi, maka sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahui segala apa yang kamu kerjakan*⁵¹

Dalam surah An-nisa ayat 135 diatas menerangkan bahwa Allah SWT memerintahkan untuk untuk berbuat adil dalam setiap proses peradilan baik itu pada proses pembuktian maupun proses lainnya. dalam proses pemberian keterangan seseorang tidak boleh berkata yang tidak sebenarnya atau menyimpan dari fakta yang sebenarnya terjadi, dalam pembuktian tentunya kita harus memiliki alat bukti sebagai dasar penetapan bersalah atau tidaknya seseorang yang di duga melakukan tindak pidana.

Alat bukti dapat di definisikan sebagai segala hal yang dapat di gunakan untuk membuktikan perihal kebenaran suatu peristiwa di pengadilan. Mengenai apa saja yang termasuk alat bukti, masing-masing hukum acara pidana berbeda dengan alat bukti dalam hukum acara perdata. Demikian pula alat bukti yang berlaku bagi acara persidangan dalam perkara-perkara tertentu seperti hukum acara Mahkamah Konstitusi, hukum acara dalam persidangan kasus korupsi, hukum acara dalam kasus terorisme, dan masih banyak lagi.⁵²

⁵¹ Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahnya* CV. Karya Insan Indonesia Jakarta h

⁵² Eddy O.S Hiariej, *Teori&Hukum Pembuktian* Penerbit Erlangga 2012 h 52

Dalam konteks teori, wujud bukti dapat beraneka ragam seperti saksi mata, ahli, dokumen, sidik jari, DNA dan lain sebagainya. Apapun bentuknya, Colin Evans membagi bukti dalam dua kategori, yaitu bukti langsung atau *direct evidence* dan bukti tidak langsung atau *circumstantial evidence*. Kendatipun demikian, dalam konteks persidangan pengadilan tidak ada perbedaan antara *direct evidence* dan *circumstantial evidence*, namun perihal kekuatan pembuktian perbedaan tersebut cukup signifikan. *Circumstantial evidence* diartikan sebagai bentuk bukti yang boleh dipertimbangkan hakim terkait fakta-fakta yang tidak langsung dilihat oleh saksi mata⁵³

Alat bukti diatur dalam pasal 183 KUHAP yang berbunyi :

“Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan terdakwa yang bersalah melakukannya”

Rumusan pasal ini memberikan kita garis hukum bahwa;

- a. alat bukti diperoleh dari hasil pemeriksaan di sidang pengadilan.
- b. hakim mengambil putusan berdasarkan keyakinannya.
- c. keyakinan hakim diperoleh dari minimal dua alat bukti yang sah.

Diformulasikan oleh Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 (KUHP) adanya 5 alat bukti yang sah⁵⁴.

Pasal 184 KUHAP menyatakan bahwa alat-alat bukti yang sah adalah:

1. keterangan saksi

⁵³ Eddy O.S Hiariej, *Teori & Hukum Pembuktian* Penerbit Erlangga 2012 h 52

⁵⁴ Bambang Waluyo *Sistem Pembuktian Dalam Peradilan Indonesia* Sinar Grafika Jakarta

2.keterangan ahli

3.surat

4.petunjuk

5.keterangan terdakwa⁵⁵

Untuk selanjutnya uraian perihal alat bukti ini berpangkal tolak pada penjabaran dari masing-masing alat bukti sebagaimana tersebut dalam pasal 184 KUHAP.

a. Keterangan Saksi

Dinyatakan oleh pasal 1 butir 27 KUHAP,yang dimaksud “keterangan saksi” adalah salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan pengetahuannya itu.

Dari bunyi pasal diatas dapat disimpulkan unsur pentingketerangan saksi yakni:

- 1) Keterangan dari orang (saksi)
- 2) Mengenai suatu peristiwa pidana
- 3) Yang di dengar sendiri,lihat sendiri dan dialami sendiri.⁵⁶

b. Keterangan ahli

Mengenai apa yang dimaksud dengan keterangan ahli, pasal 1 butir 28 KUHAP menyebutkan sebagai “keterangan yang di berikan oleh

⁵⁵ Bambang Waluyo *Sistem Pembuktian Dalam Peradilan Indonesia Sinar Grafika Jakarta* 1996 h10-11

⁵⁶ Bambang Waluyo *Sistem Pembuktian Dalam Peradilan Indonesia Jakarta* 1996 h11

seorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal-hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan”. Hal yang membedakannya dengan keterangan saksi adalah pemberi keterangan ini harus mempunyai keahlian khusus, sehingga dapat memberi penilaian dan kesimpulan⁵⁷.

c. Surat

Selain pasal 184 yang menyebut alat-alat bukti maka hanya ada satu pasal saja dalam KUHAP yang mengatur tentang alat bukti surat yaitu pasal 187. Pasal itu terdiri atas 4 ayat :

1. Berita acara dan surat lain dalam bentuk resmi yang dibuat oleh pejabat umum yang berwenang atau yang di buat di hadapannya, yang memuat keterangan tentang kejadian atau keadaan yang didengar, dilihat, atau yang dilaminya sendiri, disertai dengan alasan yang jelas dan tegas tentang keterangan itu
2. Surat yang dibuat menurut ketentuan peraturan perundang-undangan atau surat dibuat oleh pejabat mengenai hal yang termasuk dalam tata laksana yang menjadi tanggung jawabnya dan yang di peruntukkan bagi pembuktian sesuatu hal atau sesuatu keadaan
3. Surat keterangan dari seorang ahli yang memuat pendapat berdasarkan keahliannya mengenai sesuatu hal atau keadaan yang diminta secara resmi dari padanya
4. Surat lain yang hanya dapat berlaku jika ada hubungan dengan isi dari

⁵⁷ Bambang Waluyo *Sistem Pembuktian Dalam Peradilan Indonesia* Jakarta 1996 h19

alat pembuktian yang lain.⁵⁸

d. Petunjuk

Tentang apa yang dimaksud petunjuk , pasal 188 ayat (1) merumuskan sebagai “perbuatan, kejadian atau keadaan yang karena persesuaiannya, baik anantara yang satu dengan yang lain,maupun dengan tindak pidana itu sendiri, menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya”

Apabila ayat (1) ini langsung kita kaitkan dengan ayat (2) dan (3) maka petunjuk ini merupakan sutau kontruksi tentang:

- Perbuatan, kejadian atau kedaan tertentu;
- Karena persuaian anantara keterangan saksi,surat dan keterangan terdakwa dengan tindak pidana yang terjadi;
- Berdasar penilaian hakim

Jadi pemegang peran dalam penentuan alat bukti petunjuk adalah Hakim.⁵⁹

e. Keterangan Terdakwa

Didalam KUHAP terdapat dua definisi sehubungan dengan keterangan terdakwa ini, yakni definisi terdakwa dan definisi dari keterangan terdakwa. Definisi tentang terdakwa disebut dalam pasal 1 butir 15, sedangkan untuk keterangan terdakwa di formulasikan pada pasal 189 ayat (1) KUHAP.

- Pasal 1 butir 15 KUHAP menyebutkan ,” terdakwa adalah seorang

⁵⁸ Andi Hamzah ,*Hukum Acara Pidana Indonesia Edisi Revisi* Sinar Grafika Jakarta 2004 h 270

⁵⁹ Bambang Waluyo *Sistem Pembuktian Dalam Peradilan Indonesia* Jakarta 1996 h 22

tersangka yang di tuntutan, di periksa dan diadili di sidang pengadilan”⁶⁰

- Pasal 189 Ayat (1) KUHAP menyatakan :
“keterangan terdakwa ialah apa yang terdakwa nyatakan di sidang tentang perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahui sendiri atau alami sendiri”

Apabila kita cermati jenis alat bukti yang sah, ternyata bukti yang di peroleh penyidik merupakan cikal bakal alat bukti yang diperoleh di sidang pengadilan.

Saksi, ahli dan tersangka yang telah di periksa di tingkat penyidikan yang di tuangkan dalam BAP, dipanggil dan di periksa di sidang pengadilan untuk mendapatkan alat bukti.

Jadi yang bernilai alat bukti adalah keterangan saksi dan keterangan terdakwa yang di berikan di sidang pengadilan dan bukan keterangan yang di berikan dalam BAP di penyidikan.

Surat yang disita penyidik kembali di ajukan di sidang pengadilan untuk di gunakan sebagai alat bukti surat. Sedangkan barang bukti yang telah di sita secara sah oleh penyidik juga diajukan ke sidang pengadilan untuk di gunakan bukti petunjuk.

D. Tinjauan Tentang Visum et Repertum

1. Pengertian Visum et Repertum

Visum et Repertum (VER) adalah laporan tertulis (termasuk kesimpulan yakni sebab-sebab perlukaan/kematian), yang di buat oleh dokter berdasarkan sumpah jabatan, mengenai apa yang dilihat/diperiksa berdasarkan keilmuannya, atas

⁶⁰ Bambang Waluyo *Sistem Pembuktian Dalam Peradilan Indonesia* Jakarta 1996 h 23

permintaan tertulis dari pihak yang berwajib, untuk kepentingan peradilan.⁶¹

Visum et Repertum termasuk alat bukti berdasarkan dalam pasal 187 KUHP. Surat keterangan dari seorang ahli yang memuat pendapat berdasarkan keahliannya mengenai suatu hal atau keadaan berdasarkan keahliannya mengenai suatu hal atau suatu keadaan yang diminta secara resmi dari padanya.⁶²

Patut diperhatikan bahwa bahwa KUHAP membedakan keterangan seorang ahli di persidangan sebagai alat bukti “keterangan ahli” (pasal 186 KUHAP) dan keterangan seorang ahli secara tertulis di luar sidang pengadilan sebagai alat bukti “surat” (pasal 187 butir c KUHAP).⁶³

Unsur-unsur yang terkandung dalam definisi *Visum et Repertum* (VeR):

- Laporan tertulis (RIB pasal 295, termasuk surat-surat)
- Dokter (RIB pasal 69 ayat 1) yang sekaligus merupakan pangkal tolak ilmu kedokteran forensik.
- DD/(Diagnosa Deferensial): bila oleh ahli lain disebut ekspertise
- Sumpah jabatan (LN no. 350 tahun 1937) dan RIB pasal 305)
- Apa yang di lihat dan diperiksa ; yaitu bagian pemberitaan dari Ver (RIB pasal 301)
- Berdasarkan keilmuannya dari pihak berwajib (RIB 66)
- Untuk kepentingan peradilan.⁶⁴

⁶¹Agus Purwadianto,dkk,*Kristal-Kristal Ilmu Kedokteran Forensik* , Bagian Ilmu Kedokteran Forensik Jakarta 1981 h.5

⁶² Eddy O.S Hiarij, *Teori&Hukum Pembuktian* Penerbit Erlangga Jakarta 2012 h 109

⁶³ Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia* Jakarta 2004 h 269

⁶⁴Agus Purwadianto,dkk,*Kristal-Kristal Ilmu Kedokteran Forensik* , Bagian Ilmu Kedokteran Forensik Jakarta 1981 h. 5

2. Prosedur Administratif dalam meminta Visum

- a. Si Peminta VeR (Penanda tangan harus yang berhak).
 - Polisi (pembantu jaksa): RIB pasal 53, pangkat PELDA keatas atau merupakan pejabat fungsional suatu wilayah kepolisian).
 - Jaksa: RIB pasal 68.
- b. Bentuk Permintaan harus tertulis.
- c. Benda Bukti. Jenazah harus sah/disegel (RIB pasal 66). Bila korban hidup harus di temani polisi yang berwenang (pengganti label)⁶⁵

3. Bagian-Bagian VeR

- a. Projustitia: untuk menggantikan kewajiban menempelkan materei. (arti:Demi Keadilan”)

b. Pendahuluan

Memuat : Identitas; pemeriksa, korban, peminta VeR

Pemeriksaan : waktu dan tempat

c. Pemberitaan:

Memuat:

- Deskripsi keadaan tubuh manusia (hidup/mati) seperti apa yang terlihat pada saat itu (tidak boleh menyangkut hal-hal yang telah lampau), termasuk pemeriksaan laboratorium/lampiran ekspertise.
- Hindarkan istilah medis yang tidak di ketahui awam (bagian ini merupakan kesaksian ahli/dokter)

⁶⁵ Agus Purwadianto, dkk, *Kristal-Kristal Ilmu Kedokteran Forensik* , Bagian Ilmu Kedokteran Forensik Jakarta 1981 h. 5

d. Kesimpulan

Memuat :

- Jenis luka
- Jenis kekerasan- penyebab luka/kematian
- Mekanisme kematian
- Gunakan bahasa sesuai dengan istilah hukum.

e. Penutup

Memuat :

- Pernyataan VeR di buat berdasarkan sumpah jabatan sesuai dengan LN no 350 tahun 1937 dan tanda tangan dokter.⁶⁶

4. Kekuatan daya bukti *Visum et Repertum*

- a. Kekuatan/daya bukti VeR terletak pada bagian pemberitaan sebagai kesaksian dokter
- b. Bagian Kesimpulan, merupakan pendapat pribadi dokter, dan hanya berfungsi sebagai keterangan/pengarahan yang tidak harus diikuti hakim (RIB pasal 305 ayat (2) RIB pasal 306 ayat (2))⁶⁷

5. *Visum et Repertum* dalam Delik Kesusilaan

Dalam hal ini haruslah diingat bahwa pengertian “perkosaan” adalah istilah hukum, bukanlah istilah medis sesuai dengan definisinya; Perkosaan adalah persetubuhan yang dilakukan seorang laki-laki terhadap wanita di luar pernikahan dengan kekerasan atau ancaman kekerasan. Pengertian “diluar

⁶⁶Agus Purwadianto,dkk,*Kristal-Kristal Ilmu Kedokteran Forensik* , Bagian Ilmu Kedokteran Forensik Jakarta 1981 *Forensik* , h. 6

⁶⁷Agus Purwadianto,dkk,, *Kristal-Kristal Ilmu Kedokteran Forensik* , Bagian Ilmu Kedokteran Forensik Jakarta 1981 h. 6

pernikahan dan ancaman” tidak dapat di buktikan secara medis.⁶⁸

Tugas Dokter dalam kasus delik kesusilaan ini adalah membuktikan:

- Adanya kekerasan
- Adanya tanda kekerasan(memingsangkan=kekerasan)
- Adanya tanda kedewasaan



⁶⁸Agus Purwadianto,dkk, *Kristal-Kristal Ilmu Kedokteran Forensik* , Bagian Ilmu Kedokteran Forensik Jakarta 1981, h. 57

BAB III

METODE PENELITIAN

A. *Jenis dan Lokasi Penelitian*

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian hukum normatif-empiris yaitu secara yuridis mengkaji peraturan tentang *Visum et Repertum* dalam pembuktian yang diatur dalam Undang-Undang No.8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. Kemudian secara empiris mengkaji dalam penerapannya pada proses pengadilan pidana dengan melakukan metode wawancara dan dokumentasi serta menggambarkan fakta yang terjadi di lapangan.

2. Lokasi Penelitian

Untuk mendapatkan data dan informasi yang dibutuhkan dalam penyusunan skripsi ini, maka lokasi penelitian yang dipilih yaitu di Pengadilan Negeri Sungguminasa. Dipilihnya lokasi tersebut dengan pertimbangan karena di Pengadilan Sungguminasa terdapat putusan yang ingin diteliti yaitu putusan 06/Pid.Sus/2016/PN.Sgm.

B. *Metode Pendekatan*

1. Pendekatan Yuridis yaitu suatu cara/metode yang digunakan berdasarkan peraturan-peraturan yang berlaku, yang memiliki korelasi dengan masalah yang diteliti.

2. Pendekatan Sosiologis yaitu pendekatan terhadap gejala sosial yang timbul dalam masyarakat.

C. Jenis dan Sumber Data

1. Data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari lapangan melalui teknik wawancara dengan narasumber yaitu Hakim Pengadilan Negeri Sungguminasa.
2. Data sekunder yaitu data yang diperoleh melalui studi kepustakaan berbagai sumber, seperti buku, perundang-undangan, majalah, jurnal, karya ilmiah, internet, dan berbagai sumber lainnya berkaitan dengan masalah yang diteliti.

D. Metode Pengumpulan Data

Penelitian ini adalah *Normatif Empiris*, maka data penelitian ini diperoleh dengan berbagai cara yaitu:

1. Wawancara yaitu tanya jawab lisan antara dua orang atau lebih secara langsung¹. Dengan wawancara langsung kepada Hakim Pengadilan negeri Sungguminasa
2. Dokumentasi yaitu pengambilan data yang diperoleh melalui dokumen-dokumen.² Yaitu berupa salinan putusan kasus perkosaan.

¹Husaini Usman dkk, *Metode Penelitian Sosial* (Cet v, Jakarta: PT Bumi Aksara, 2004), h.58

²Husaini Usman dkk, *Metode Penelitian Sosial*, h.73

E. *Analisis Data*

Adapun analisis data yang digunakan yakni analisis kualitatif yaitu teknik pengolahan data kualitatif (kata-kata) yang dilakukan dalam rangka mendeskripsikan/ membahas hasil penelitian dengan pendekatan analisis konseptual dan teoretik.



BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Aturan Hukum Tentang Visum et Repertum sebagai Pembuktian dalam Tindak Pidana Perkosaan

Pembuktian tindak pidana perkosaan pada dasarnya sama dengan pembuktian pada kasus pidana pada umumnya. Pembuktian sebagai bagian dari proses penegakan keadilan yang caranya di atur peraturan perundang-undangan. Hakim dalam menjatuhkan suatu putusan tidak boleh asal dan alat bukti yang masuk dalam persidanganpun harus merupakan alat bukti yang sah menurut undang-undang yang sesuai dengan aturan dalam beracara, sebagaimana telah diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), adapun apa yang di maksud alat bukti sudah diatur dalam pasal 184 ayat (1) KUHAP yang berbunyi

Alat bukti yang sah ialah:

- a. Keterangan saksi;
- b. Keterangan ahli;
- c. Surat ;
- d. Petunjuk;
- e. Keterangan terdakwa.

Pembuktian merupakan masalah yang memegang peranan dalam proses pemeriksaan sidang pengadilan. Melalui pembuktian ditentukan nasib terdakwa. Apabila hasil sidang pembuktian dengan alat-alat bukti yang ditentukan undang-undang “tidak cukup” membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa, terdakwa “dibebaskan” dari hukuman. Sebaliknya, kalau terdakwa dibuktikan dengan alat-alat bukti yang disebut dalam pasal 184, terdakwa dinyatakan bersalah. KEPADANYA akan di jatuhkan hukuman. Oleh karena itu hakim harus berhati-hati,

cermat. Dan matang menilai dan mempertimbangkan nilai pembuktian. Meneliti sampai dimana batas minimum “kekuatan pembuktian” atau *bewijs kracht* dari setiap alat bukti yang di sebut dalam pasal 184 KUHAP.¹

Dalam kasus perkosaan, penyidik dan jaksa penuntut umum biasanya dalam hal pembuktian menggunakan bantuan dari segi pengetahuan lain yaitu ilmu kedokteran Forensik “*Forensic medicine*”, penyidik meminta kepada saksi korban untuk melakukan visum di rumah sakit rujukan dari penyidik atau Jaksa.

Visum et Repertum adalah istilah asing, namun menyatu dalam bahasa Indonesia sehingga orang-orang awam sekalipun dapat mengetahui bahwa *Visum et Repertum* ini berkaitan dengan surat yang dikeluarkan oleh dokter untuk polisi demi proses di pengadilan². Didalam pengadaan visum diatur KUHAP dalam pasal 133 (1) dan (2) KUHAP berbunyi

“Dalam hal penyidik untuk kepentingan peradilan menangani seorang korban baik luka, keracunan ataupun mati yang di duga karena peristiwa yang merupakan tindak pidana, ia berwenang mengajukan permintaan keterangan ahli kepada kedokteran kehakiman atau dokter atau ahli lainnya”

“ Permintaan keterangan ahli sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan secara tertulis, yang dalam surat itu disebutkan dengan tegas untuk pemeriksaan luka atau pemeriksaan mayat dan atau pemeriksaan bedah mayat”

Dalam kasus perkosaan visum itu sendiri berguna untuk membuka terang menderang mengenai suatu kasus tindak pidana, dengan bantuan dokter menemukan tanda-tanda adanya kekerasan secara fisik ataupun psikis, Visum di harapkan memberikan keterangan dokter mengenai apa yang di periksanya terhadap saksi

¹ M.Yahya Harahap ,“Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali” Edisi Kedua Sinar Grafika Jakarta 2003 h273

² Amri Amir, *Rangkaian Ilmu Kedokteran Forensik* Edisi kedua Ramadhan Medan 2005 h 205

korban terutama terhadap hal alat kelamin korban, misalnya terdapat luka, sebab-sebab perlukaan dan tanda-tanda persetubuhan. visum berisi pemberitaan atau keterangan mengenai keahlian dokter. Bisa dikatakan *Visum et Repertum* berupa serangkaian hasil pemeriksaan oleh dokter apa yang di lihat dan diketahuinya berdasarkan keilmuannya kemudian dari hasil pemeriksaan tersebut diharapkan akan terungkap sebab-sebab terjadinya dan dalam kaitannya dugaan kemungkinan telah terjadinya tindak pidana perkosaan. Kemudian oleh dokter tersebut mengeluarkan *Visum et Repertum* di kuatkan oleh sumpah jabatannya, lalu di gunakan sebagai alat bukti di pengadilan.

Visum et Repertum sendiri memiliki kedudukan sebagai alat bukti surat seperti yang di terangkan diatas pada pasal 184 ayat (1) huruf c diatas, Kemudian Visum diatur secara khusus sebagai alat bukti surat sebagaimana pada pasal 187 berbunyi:

Surat sebagaimana tersebut pada pasal 184 ayat (1) huruf c, dibuat atas sumpah jabatan atau dikuatkan dengan sumpah

- a. Berita acara dan surat lain dalam bentuk resmi yang dibuat oleh pejabat umum yang berwenang atau yang di buat di hadapannya, yang memuat keterangan tentang kejadian atau keadaan yang didengar, dilihat, atau yang dilaminya sendiri, disertai dengan alasan yang jelas dan tegas tentang keterangan itu
- b. Surat yang dibuat menurut ketentuan peraturan perundang-undangan atau surat dibuat oleh pejabat mengenai hal yang termasuk dalam tata laksana yang menjadi tanggung jawabnya dan yang di peruntukkan bagi pembuktian sesuatu hal atau sesuatu keadaan
- c. Surat keterangan dari seseorang ahli yang memuat pendapat berdasarkan keahliannya mengenai sesuatu hal atau keadaan yang diminta secara resmi dari padanya
- d. Surat lain yang hanya dapat berlaku jika ada hubungan dengan isi dari alat pembuktian yang lain.³

³ Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia Edisi Revisi* Sinar Grafika Jakarta 2004 h

Berdasarkan ketentuan diatas yang dapat disebut alat bukti surat yang dimaksud pasal 187 adalah surat yang dibuat atas sumpah jabatan, atau surat yang dikuatkan dengan sumpah. *Visum et Repertum* diartikan sebagai surat keterangan ahli yang memuat pendapat berdasarkan keahliannya mengenai suatu keadaan yang diminta secara resmi padanya seperti pada pasal 187 huruf c.

Nilai kekuatan pembuktian surat dari segi formal sebagai alat bukti yang sempurna. Namun *Visum et Repertum* dari segi materiil sendiri mempunyai nilai pembuktian yang “bersifat bebas” yang artinya sama dengan alat bukti lainnya hakimlah yang menentukan apakah ingin kemudian hasil keterangan dari *visum et repertum* itu akan di formulasikan sebagai bahan pertimbangan untuk memutus terdakwa bersalah atau tidak bersalah, dan majelis hakim harus bersifat netral dalam persidangan dan sesuai dengan prosedural yang ada.

Sebagaimana penjelasan diatas *Visum et Repertum* termasuk dalam alat bukti surat, *Visum et Repertum* adalah alat bukti yang sah menurut undang-undang dan berkekuatan hukum, karena diatur oleh undang-undang yaitu pada pasal 184 ayat (1) huruf c lalu secara khusus dalam 187 huruf c KUHAP. Dalam kasus perkosaan visum memiliki peran penting sebagai alat bukti untuk membuka terang menderang suatu kasus khususnya perkosaan dan untuk memperkuat pembuktian, sulitnya pembuktian kasus perkosaan karena biasanya hanya melibatkan korban dan pelaku saja, sehingga alat bukti yang di dapat sedikit. *Visum et Repertum* berisi informasi atau keterangan dokter bahwa adanya kekerasan fisik pada bagian-bagian tubuh korban terutama di bagian kelamin korban berupa luka yang disebabkan alat kelamin dari si tersangka dan adanya persetubuhan. Kemudian dari keterangan tersebut dapat menjadi

pertimbangan hakim nantinya, tapi keterangan dokter yang tertuang dalam alat bukti surat visum tentunya tetap harus di dukung oleh alat bukti yang lain.

Walaupun tidak ada syarat mutlak penyidik atau jaksa penuntut umum meminta keterangan *visum et repertum* dalam perkara tindak pidana khususnya untuk kasus perkosaan itu sendiri, tapi Visum adalah alat bukti surat yang berkekuatan hukum dan sangat membantu dalam menemukan fakta-fakta dan sangat membantu majelis hakim dalam menemukan kebenaran materiil.

Menurut wawancara Hakim PN Sungguminasa Amiruddin Mahmud⁴

“Biasanya ada tapi tidak harus, itukan tehnik penuntut umum atau penyidik untuk membuktikan dakwaannya, penuntut umum harus itu, itukan (visum) bukti surat, untuk menopang pembuktiannya dalam perkara terjadinya permerkosaan itu, tidak harus tapi itu akan merugikan si penyidik dalam hal pembuktian di persidangan karena di persidangkan hakim tidak memihak”

Senada dengan itu, menurut R. Soeparmono⁵

“Meskipun dalam KUHAP, tidak ada keharusan bagi penyidik untuk mengajukan permintaan *Visum et Repertum* kepada ahli Kedokteran Kehakiman ataupun dokter (ahli) lainnya, akan tetapi bagi kepentingan pemeriksaan perkara serta agar lebih jelas perkaranya, sedapat mungkin bila mana ada permintaan yang diajukan kepada dokter bukan ahli, maka permintaan tersebut patut diterima (diluluskan)”

Visum et Repertum memiliki peran yang sangat membantu dalam mengungkap kebenaran, karena hasil pemeriksaan yang objektif bisa di jadikan acuan baik polisi, penuntut umum, hakim dan penasehat hukum untuk menemukan kebenaran materiil. namun dalam hal pembuktian kasus perkosaan *Visum et repertum* bukanlah alat bukti satu-satunya di gunakan dalam pembuktian kasus perkosaan, tetapi harus di dirangkaikan dengan alat bukti yang lainnya yang saling bersesuaian.

⁴ Wawancara Hakim PN Sungguminasa Amiruddin Mahmud 19 April 2017 Pukul 16 : 30 Wita

⁵ R. Soeparmono, *Keterangan Ahli & Visum Et Repertum dalam Aspek Hukum Acara Pidana* CV. Mandar Maju Bandung 2011 h 153

Penulis dapat memberikan garis besar bahwa fungsi dari *Visum et Repertum* :

- Sebagai alat bukti surat yang sah menurut undang-undang.
- Sebagai bahan pertimbangan dan memperkuat keyakinan hakim
- Sebagai bagian strategi dari jaksa penuntut umum dalam pembuktian karena beban pembuktian pada jaksa penuntut umum sebaliknya juga bisa di jadikan sebagai pembelaan dari penasehat hukum.

Penggunaan Visum dalam Kasus perkosaan :

Pengadilan Negeri	No Putusan	Pasal/Kasus
Pengadilan Negeri Sungguminasa	06/Pid.Sus/2016/PN.Sgm	Pasal 81 ayat (1) UU No.35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak (Perkosaan)
Pengadilan Negeri Sengkang	06/Pid.B/2011/PN.Skg	Pasal 285 KUHP (Perkosaan)
Pengadilan Negeri Pare-Pare	136/Pid.B/2013/PN.Parepare	Pasal 285 Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP
Pengadilan Negeri Pinrang	86/Pid.B/2016/PN.Pin	Pasal 285 jo 53 (1) KUHP Percobaan Perkosaan

Pengadilan Negeri Makassar	1459/Pid.B/2013/PN.Mks	Pasal 81 ayat (1) UU No 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak
-------------------------------	------------------------	--

Sumber : Direktori putusan Mahkamah Agung

B. Pengaruh *Visum et Repertum* terhadap pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan

Kesulitan dalam pembuktian tindak pidana perkosaan disebabkan oleh banyak hal ,semua tergantung dari latar belakang kasusnya, motif dan cara yang di gunakan pelaku tindak pidana perkosaan itu sendiri di lakukan.

Selain itu kejadian perkosaan biasanya hanya melibatkan antara korban dan pelaku, hal ini membuat majelis hakim harus benar-benar memperhatikan segala fakta hukum dan alat bukti yang ada sebagai bahan pertimbangan nantinya, kesulitan yang utama pembuktian dalam tindak pidana perkosaan karena sulit menemukan unsur paksaan dengan kekerasan/ancaman kekerasan, tapi berbeda jika korban anak-anak walaupun tidak ada unsur paksaan tapi jika temukan merayu ataupun tipu muslihat kepada anak mengajak melakukan persetubuhan maka pelaku tetap di hukum karena anak-anak diposisikan sebagai korban,karena apapun jenis persetubuhan terhadap anak itu dilarang.

Putusan hakim sendiri didasarkan pada alat bukti yang ada pada proses pembuktian, pada proses pembuktian adalah titik nadi dalam suatu persidangan karena pada proses inilah hakim mengarahkan segala kemampuannya untuk menemukan keadilan bagi korban, namun disisi lain hakim tidak boleh mengabaikan hak-hak dari terdakwa, tidak memihak dan menghargai asas *persumption of innocence* yaitu praduga tak bersalah.

Dalam menjatuhkan putusannya hakim tidak boleh begitu saja menjatuhkan putusan, karena dalam menjatuhkan putusan hakim harus didasari dua alat bukti sesuai dengan asas pembuktian minimum dan dalam pasal 183 KUHP yang berbunyi

“Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya”

Dalam pembahasan sebelumnya sudah membahas bahwa visum adalah alat bukti surat yang sah menurut undang-undang dan memiliki kekuatan hukum, jadi sudah seharusnya suatu visum akan menjadi bahan pertimbangan dalam suatu perkara tindak pidana yang menggunakan visum sebagai alat bukti.

Letak daya pembuktian dari *Visum et Repertum* itu sendiri adalah informasi atau keterangan terhadap pemeriksaan saksi korban, terutama dalam hal alat kelamin saksi korban menunjukkan bahwa adanya indikasi atau tanda-tanda telah terjadi perkosaan seperti selaput darah (*hymen*) pecah pada arah tertentu, adanya tanda kekerasan pada alat kelamin korban dikarenakan alat kelamin si terdakwa, ada luka, terdapat bercak atau sisa sperma, dan lain-lain. Apa yang diterangkan oleh dokter yang termuat dalam *Visum et Repertum* itulah yang akan menjadi pembuktiannya, Visum hanya memberikan informasi/pemberitaan seputar pemeriksannya saja.

Visum et repertum merupakan keterangan/informasi bagi hakim, karena visum termasuk alat bukti yang bersifat bebas, dan hakim tidak wajib mengikuti pendapat dokter. Di dalam *Visum et repertum* hanya menerangkan bahwa adanya “disebabkan persentuhan benda tumpul”, dokter tidak menyatakan bahwa saksi korban telah diperkosa, namun majelis hakim menjadikan keterangan *Visum et*

Repertum sebagai pertimbangan untuk memperkuat keyakinannya kemudian menyimpulkan adanya paksaan atau tidak sehingga hakim meyakini bahwa telah terjadi perkosaan.

Letak daya pembuktian *Visum et repertum* Menurut Wawancara dengan Hakim PN Sungguminasa Amirudin Mahmud⁶

“ keterangan riwayat pemeriksaan si saksi korban misalnya. terutama dalam hal alat kelaminnya menunjukkan bahwa misalnya kalau dia selaput darahnya pecah,itu biasanya dia masih perawan, arah jam berapa masuknya itu di perhatikan juga. Terus misalnya ada luka,ini luka disebelah kiri kanannya. Itu juga menunjukkan bahwa disitulah kekuatan pembuktiannya Apa yang diterangkan oleh dokter itulah kekuatan pembuktiannya”

Bagaimanapun sempurnanya nilai pembuktian alat bukti surat, kesempurnaan itu tidak dapat merubah sifatnya menjadi alat bukti yang mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang mengikat. Nilai kekuatan yang melekat pada kesempurnanya tetap bersifat kekuatan pembuktian “yang bebas”. Hakim bebas untuk menilai kekuataannya dan kebenarannya. Kebenaran penilaian itu dapat ditinjau dari beberapa alasan. Boleh dari segi asa kebenaran sejati, atas keyakinan hakim maupun dari sudut batas minimum pembuktian. Dan memang pada prinsipnya, ajaran pembuktian yang dianut hukum acara pidana pada dasarnya tidak mengenal alat bukti yang sempurna dan mengikat, kecuali bagi negara yang menganut sistem pembuktian menurut undang-undang “secara positif”.⁷

Menurut Wawancara dengan Hakim PN Sungguminasa Amirudin Mahmud⁸

“suatu alat bukti tidak dapat berdiri sendiri , harus di topang dengan alat bukti lain, keterangan saksi,petunjuk,ahli jadi dia tak bisa berdiri sendiri”

M Yahya Harahap mengatakan⁹

⁶ Wawancara Hakim PN Sungguminasa Amiruddin Mahmud 19 April 2017 Pukul 16 : 30 Wita

⁷ M.Yahya Harahap ,“Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Pemeriksaan Sidang Pengadilan ,Banding, Kasasi,dan Peninjauan Kembali” Edisi Kedua Sinar Grafika Jakarta 2003 h311

⁸ Wawancara Hakim PN Sungguminasa Amiruddin Mahmud 19 April 2017 Pukul 16 : 30 Wita

“Unsur keyakinan hakim dalam praktek, dapat di kesampirkan apabila keyakinan itu tidak dilandasi oleh pembuktian yang cukup. Sekalipun hakim yakin dengan seyakini-yakinnya akan kesalahan terdakwa, keyakinan itu dapat dianggap tidak mempunyai nilai jika tidak di barengi dengan pembuktian yang cukup”

Jadi menurut penulis antara alat bukti dan hakim akan selalu memiliki keterkaitan satu sama lain, hakim memang memiliki kewenangan untuk memberikan penilaian mengenai suatu alat bukti, tapi dalam memutuskan suatu perkara hakim harus berlandaskan pada alat bukti, yaitu minimal dua alat bukti yang sah.

Menurut hasil wawancara Hakim PN Sungguminasa Amiruddin Mahmud menambahkan ¹⁰

“keyakinan hakim di bangun oleh alat bukti dari keterangan saksi di hubungkan keterangan terdakwa, di hubungkan dengan visum barulah hakim yakin”

Jadi penulis menyimpulkan alat bukti surat *visum et repertum* memiliki keterkaitan satu sama lain atau pengaruh terhadap pertimbangan hakim dapat dilihat jika hakim menyetujui atau menerima hasil kesimpulan dan keterangan riwayat pemeriksaan korban dari *visum et repertum* , kemudian hasil itu di sertakan atau dirangkaikan dengan alat bukti lain kemudian membentuk satu kesesuaian, sehingga majelis hakim telah yakin bahwa telah terjadi tindak pidana perkosaan dan terdakwa bersalah atas perbuatannya tersebut.

1. Pembuktian Visum dalam kasus 06/Pid.Sus/2016/PN.Sgm

a. Identitas Terdakwa

Identitas Terdakwa:

⁹ M.Yahya Harahap ,“Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali” Edisi Kedua Sinar Grafika Jakarta 2003 h282

¹⁰ Wawancara Hakim PN Sungguminasa Amiruddin Mahmud 19 April 2017 Pukul 16 : 30 Wita

Nama Lengkap	: Kaharuddin Dg. Pagiling Bin Dg. Sila
Tempat Lahir	: Sökkolia Kab. Gowa
Umur/Tanggal lahir	: 37 tahun/1987
Jenis Kelamin	: Laki-laki
Kebangsaan	: Indonesia
Agama	: Islam
Pekerjann	: Sopir

b. Kasus Posisi

Berawal ketika korban Pr.Eka Ashari (17 Tahun) berada di rumah bersama adiknya yang masih berumur 7 (tujuh) bulan, tiba-tiba ada yang mengetuk pintu depan sehingga korban melihat keluar dengan membuka jendela dan melihat terdakwa berdiri di depan pintu selanjutnya terdakwa meminta kepada korban untuk membuka pintu belakang rumah korban dengan alasan bahwa terdakwa mau mencuci kakinya.

Dan pada saat itu korban sempat menolak untuk membuka pintu namun terus didesak oleh terdakwa, hingga akhirnya korban membuka pintu belakang, namun pada saat korban membuka pintu belakang tiba-tiba muncul Lk. Jumsah (berkas terpisah) dan langsung masuk ke dalam rumah dan karena korban ketakutan, korban kemudian berlari ke pintu depan untuk melarikan diri setelah pintu depan terbuka, kemudian muncul terdakwa dan langsung masuk kedalam rumah, pada data terdakwa dan Lk.Jumsah berada dalam rumah, terdakwa langsung menarik rambut korban sedangkan Lk.Jumsah menarik tangan kiri korban dan karena korban ketakutan,

korban berteriak minta tolong namun teriakan korban tidak ada yang mendengar hingga akhirnya terdakwa dan Lk. Jumsah menarik korban masuk kedalam kamar tidur korban dan sesampainya di dalam kamar, terdakwa dan Lk. Jumsah menampar korban beberapa kali dengan menggunakan telapak tangan yang terbuka dan mengenai wajah korban secara bergantian dan kemudian terdakwa dan Lk. Jumsah memukul korban dengan menggunakan kepalan tangan / tinju yang mengenai badan korban sehingga korban merasakan kesakitan dan kemudian terdakwa dan Lk. Jumsah memaksa korban untuk berbaring di tempat tidur dan Lk. Jumsah memegang tangan korban sedangkan terdakwa membuka pakaian korban dengan cara memaksa korban, tetapi korban sempat melawan dengan cara menendang-nendang tetapi terdakwa berhasil menarik semua pakaian korban, setelah pakaian korban terlepas dari badan korban, selanjutnya korban merasakan penis terdakwa dimasukkan kedalam vagina korban selanjutnya terdakwa melakukan gerakan naik turun sehingga penisnya keluar masuk kedalam vagina korban sampai sperma terdakwa keluar setelah terdakwa melakukan persetubuhan tersebut, terdakwa kemudian bergantian memegang tangan korban dan Lk. Jumsah yang memperkosa korban dengan cara Lk. Jumsah memasukkan penisnya kedalam vagina korban selanjutnya Lk. Jumsah melakukan gerakan naik turun sehingga penisnya keluar masuk kedalam vagina korban sampai spermanya keluar dan setelah terdakwa dan Lk. Jumsah melakukan perkosaan terhadap diri korban kemudian terdakwa mengangkat adik korban yang baru berumur 7 (tujuh) bulan naik ke atas tempat tidur, sambil mengancam korban dengan mengatakan “jangan beri tahu orang lain dan ibumu, apabila kamu kasih tau. Saya akan membunuh ibu dan adikmu” setelah itu terdakwa dan Lk. Jumsah meninggalkan rumah korban.

Dan setelah kejadian pertama tersebut terjadi, korban tidak memberitahukan orang tuanya karena merasa takut akan ancaman yang dilakukan oleh terdakwa dan Lk. Jumsah, dan 2(dua) hari kemudian (korban tidak ingat hari dan tanggal serta bulan , namun masih sekitar bulan agustus 2015) , terdakwa kembali datang kerumah korban pada saat itu korban sementara tidur dikamar depan (kamar tidur ibu), terdakwa masuk kedalam rumah korban dengan cara membuka jendela rumah korban yang tidak terkunci dan kemudian terdakwa menarik rambut korban dan menampar wajah korban karena korban menolak untuk melayani nafsu setan terdakwa, tak lama kemudian terdakwa kembali menarik korban kesebelah kekamar tidur korban dan kemudian terdakwa memaksa menarik celana dan celana dalam korban sampai sebatas betis lalu terdakwa memasukkan penisnya keluar masuk kedalam vagina korban sampai spermanya keluar dan setelah melakukan perkosaan tersebut, terdakwa langsung meninggalkan rumah korban.

Setelah kejadian kedua terjadi, korban masih tidak memberitahukan kejadian tersebut kepada kedua orang tuanya karena takut ancaman yang dilakukan oleh terdakwa, namun terdakwa tetap leluasa melampiaskan nafsunya, dan 2 (hari) kemudian setelah perkosaan yang kedua terdakwa datang kerumah korban dan kembali melakukan kekerasan dan ancaman kekerasan kepada korban kemudian memperkosa korban kembali. Barulah setelah kejadian tersebut korban baru melaporkan kejadian ini karena selama ini korban merasa takut karena terdakwa mengancam akan membunuh adik dan ibu korban dan korban merasa takut karena haid sudah tidak datang selama 2 (dua) bulan dan kemudian korban melaporkan kejadian kepada Per.Andi Hamsinah dan dari hasil visum bahwa korban sudah positif hamil.

c. Tuntutan

1. Menyatakan terdakwa Kaharuddin Dg. Pagiling Bin Dg.Sila bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak Pr.Eka Ashari untuk melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau yang turut serta melakukan perbuatan itu” sebagaimana diatur dalam pasal 81 ayat (1) UU No.35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Kaharuddin Dg. Pagiling Bin Dg.Sila dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun penjara dan denda Rp.5.000.000.000,00(lima milyar rupiah) subs 1 (satu) tahun kurungan dikurangkan selama terdakwa ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar baju kaos kuning bercorak hitam bergambar belakang BALI
 - 1 (satu) lembar celana tidur panjang warna biru dan bergambar
 - 1 (satu) lembar celana dalam warna coklat

Barang bukti dialihkan dalam perkara Kaharuddin Dg.Pagiling
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah)

d. Dakwaan

Menimbang ,bahwa terdakwa diajukan kepersidangan dengan dakwaan tunggal sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa Kaharuddin Dg. Pagiling Bin Dg. Sila, bersama-sama dengan Lk. Jumsa DG. Kulle Bin Sale Dg. Bella (berkas perkara terpisah) Kejadian persetubuhan terjadi sebanyak 3 (kali), adapun kejadian pertama dan kedua dan ketiga yakni terjadi pada bulan Agustus 2015 sekitar pukul 20.00 wita di kamar rumah korban di perumahan BTN Sarindah Blok C No. 21 Akasia, Desa Sokkolia, Kec. Bontomarannu Kab. Gowa atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sungguminasa dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memksa anak Pr. Eka Ashari (17 Tahun) untuk melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, dilakukan oleh terdakwa sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas , berawal ketika korban berada di rumah bersama adiknya yang masih berumur 7 (tujuh) bulan, tiba-tiba ada yang mengetuk pintu depan sehingga korban melihat keluar dengan membuka jendela dan melihat terdakwa berdiri di depan pintu selanjutnya terdakwa meminta kepada korban untuk membuka pintu belakang rumah korban dengan alasan bahwa terdakwa mau mencuci kakinya.

Namun pada saat itu korban sempat menolak untuk membuka pintu namun terus didesak oleh terdakwa, hingga akhirnya korban membuka pintu belakang, namun pada saat korban membuka pintu belakang tiba-tiba muncul Lk. Jumsah (berkas terpisah) dan langsung masuk ke dalam rumah dan karena korban ketakutan,

korban kemudian berlari ke pintu depan untuk melarikan diri setelah pintu depan terbuka, kemudian muncul terdakwa dan langsung masuk ke dalam rumah, pada saat terdakwa dan Lk. Jumsah berada dalam rumah, terdakwa langsung menarik rambut korban sedangkan Lk. Jumsah menarik tangan kiri korban dan karena korban ketakutan, korban berteriak minta tolong namun teriakan korban tidak ada yang mendengar hingga akhirnya terdakwa dan Lk. Jumsah menarik korban masuk ke dalam kamar tidur korban dan sesampainya di dalam kamar terdakwa dan Lk. Jumsah menampar korban beberapa kali dengan menggunakan telapak tangan yang terbuka dan mengenai wajah korban secara bergantian dan kemudian terdakwa dan Lk. Jumsah memukul korban dengan menggunakan kepalan tangan / tinju yang mengenai badan korban sehingga korban merasakan kesakitan dan kemudian terdakwa dan Lk. Jumsah memaksa korban untuk berbaring di tempat tidur dan Lk. Jumsah memegang tangan korban sedangkan terdakwa membuka pakaian korban dengan cara memaksa korban, tetapi korban sempat melawan dengan cara menendang-nendang tetapi terdakwa berhasil menarik semua pakaian korban, setelah pakaian korban terlepas dari badan korban, selanjutnya korban merasakan penis terdakwa dimasukkan ke dalam vagina korban selanjutnya terdakwa melakukan gerakan naik turun sehingga penisnya keluar masuk ke dalam vagina korban sampai sperma terdakwa keluar setelah terdakwa melakukan persetubuhan tersebut, terdakwa kemudian bergantian memegang tangan korban dan Lk. Jumsah yang memperkosa korban dengan cara Lk. Jumsah memasukkan penisnya ke dalam vagina korban selanjutnya Lk. Jumsah melakukan gerakan naik turun sehingga penisnya keluar masuk ke dalam vagina korban sampai spermanya keluar dan setelah terdakwa dan Lk. Jumsah melakukan perkosaan terhadap diri korban kemudian terdakwa mengangkat adik korban yang baru

berumur 7 (tujuh) bulan naik ke atas tempat tidur, sambil mengancam korban dengan mengatakan “jangan beri tahu orang lain dan ibumu, apabila kamu kasih tau. Saya akan membunuh ibu dan adikmu” setelah itu terdakwa dan Lk. Jumsah meninggalkan rumah korban.

Setelah kejadian pertama tersebut terjadi, korban tidak memberitahukan orang tuanya karena merasa takut akan ancaman yang dilakukan oleh terdakwa dan Lk. Jumsah, dan 2(dua) hari kemudian (korban tidak ingat hari dan tanggal serta bulan , namun masih sekitar bulan agustus 2015) , terdakwa kembali datang kerumah korban pada saat itu korban sementara tidur dikamar depan (kamar tidur ibu), terdakwa masuk kedalam rumah korban dengan cara membuka jendela rumah korban yang tidak terkunci dan kemudian terdakwa menarik rambut korban dan menampar wajah korban karena korban menolak untuk melayani nafsu setan terdakwa, tak lama kemudian terdakwa kembali menarik korban kesebelah ke kamar tidur korban dan kemudian terdakwa memaksa menarik celana dan celana dalam korban sampai sebatas betis lalu terdakwa memasukkan penisnya keluar masuk kedalam vagina korban sampai spermanya keluar dan setelah melakukan perkosaan tersebut, terdakwa langsung meninggalkan rumah korban.

Setelah kejadian kedua terjadi, korban masih tetap bungkam tidak memberitahukan kejadian tersebut kepada kedua orang tuanya karena takut ancaman yang dilakukan oleh terdakwa, namun terdakwa tetap leluasa melampiaskan nafsunya, dan 2 (hari) kemudian setelah perkosaan yang kedua terdakwa datang kerumah korban dan kembali melakukan kekerasan dan ancaman kekerasan kepada korban kemudian memperkosa korban kembali.

Atas kejadian tersebut korban baru melaporkan kejadian ini karena selama ini korban merasa takut karena terdakwa mengancam akan membunuh adik dan ibu korban dan korban merasa takut karena haid sudah tidak datang selama 2 (dua) bulan dan kemudian korban melaporkan kejadian kepada Per.Andi Hamsinah dan dari hasil visum bahwa korban sudah positif hamil.

Bahwa Berdasarkan *Visum et Repertum* dari Rumah Sakit Bhayangkara Mappaoudang Makassar No.:63/X/2015/Forensik, tanggal 27 Oktober 2015 yang di tanda tangani oleh dr.Mauluddin M, Sp.F, yang hasil pemeriksaannya terhadap Pr.Eka Ashari Binti H.Mansur , pada pokoknya meenyimpulkan sebagai berikut :

1. Hasil Pemeriksaan :

Alat kelamin wanita

- Serambi kemaluan (*Vestibulum Vaginae*) tidak di temukan lecet kemerahan.
- Selaput dara (*hymen*) ditemukan luka robek lama pada selaput dara arah jam 1,3,6, dan 8

2. Tindakan pemeriksaan medis

Tes kehamilan : positif (+).

Kesimpulan :

1. Telah dilakukan pemeriksaan terhadap seseorang, berjenis kelamin perempuan berusia anak

2. Selaput dara di temukan luka robek lama sesuai akibat persentuhan benda tumpul.

3. Serambi kemaluan tidak ditemukan kelainan

4. Liang Senggama tidak ditemukan kelainan

5. Tanda Kehamilan ditemukan pada saat pemeriksaan

6. Perlukaan pada bagian tubuh lainnya tidak ditemukan

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 81 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP Jo. Pasal 64 ayat (1) ke- 1 KUHP

e. Pertimbangan Hakim

Menimbang bahwa selanjutnya untuk menentukan apakah terdakwa dapat dipersalahkan atas perbuatan yang didakwakan kepadanya maka majelis Hakim perlu terlebih dahulu melihat unsure Pasal yang menjadi dasar dakwaan dalam perkara ini.

Menimbang , karena terdakwa oleh Penuntut umum telah didakwa dengan dakwaan tunggal yaitu primair Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 Tentang perlindungan Anak jo pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP jo.pasal 64 KUHP tentang perlindungan Anak jo pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP jo.pasal 64 KUHP ayat (1) ke-1 KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut

1. Setiap orang

2. Dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain.
3. Telah melakukan serangkaian perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut.

Ad. 1. Unsur Setiap Orang.

Menimbang , bahwa yang dimaksud dengan Unsur “Setiap orang” adalah menunjuk kepada pelaku Tindak Pidana yang saat ini sedang didakwa, dan untuk menghindari adanya kesalahan terhadap orang (*Error In Persona*) maka identitasnya diuraikan secara cermat, jelas dan lengkap dalam dakwaan.

Menimbang bahwa setelah majlisi Hakim meneliti dengan seksama perihal identitas terdakwa dipersidangan, dengan cara mendengarkan keterangan para saksi yang materinya secara substansial bersesuaian dengan keterangan terdakwa, maka majelis Hakim berpendapat bahwa seseorang yang saat ini dihadapkan untuk diadili dipersidangan, adalah benar-benar seseorang yang bernama Kaharuddin Dg.Pagiling Bin D.Sila sebagaimana identitas terdakwa yang tercantum dalam dakwaan yang diajukan oleh Penuntut Umum, sehingga tidak tercantum dalam dakwaan yang diajukan oleh Penuntut Umum, sehingga tidak terdapat kesalahan terhadap orang.

Menimbang, berdasarkan uraian pertimbangan di atas maka unsur setiap orang telah terpenuhi.

Ad. 2. Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain.

Menimbang, bahwa unsur kedua ini adalah unsur yang bersifat alternatif, maka menyebutkan kata atau melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan sehingga Majelis hakim dapat memilih langsung unsur mana yang dianggap paling tepat dalam perkara ini, dan apabila salah satu unsur terpenuhi maka unsur yang lainnya tidak perlu di pertimbangkan lagi.

Menimbang, bahwa dalam pasal 89 KUHP definisi “melakukan kekerasan” artinya mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani yang tidak kecil secara yang tidak sah.

Menimbang, bahwa pengertian ancaman kekerasan adalah setiap perbuatan secara melawan hukum berupa ucapan, tulisan,, gambar, simbol, atau gerakan tubuh, baik dengan atau tanpa menggunakan sarana yang menimbulkan rasa takut atau mengekang kebebasan hakiki seseorang.

Menimbang, bahwa definisi persetubuhan menurut Arrest Hooge Raad 5 Februari 1912, yakni peraduan antara anggota kemaluan laki-laki, dan perempuan yang biasa dijalankan untuk mendapatkan anak, jadi anggota laki-laki harus masuk kedalam anggota perempuan, sehingga mengeluarkan mani.

Menimbang, berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, yang berasal dari keterangan saksi Eka Ashari bahwa Jumsah bersama dengan terdakwa lel.Dg.Pagiling telah melakukan persetubuhan dengannya, secara bergantian. Dirumahnya beralamat di BTN Sarindah C No. 21 Akasia,Kecamatan Bontomarannu, Kabupaten Gowa, hal ini sesuai dengan keterangan Jumsah, yang menerangkan bahwa ia telah melakukan persetubuhan dengan korban Eka secara bergantian dengan terdakwa Dg. Pagiling, namun persetubuhan itu dilakukan atas dasar suka sama suka,

dan menurut keterangan terdakwa Dg.Pagiling bahwa benar ia pernah melakukan persetubuhan dengan korban Eka, karena ia telah menjalin hubungan asmara dengan korban Eka.

Menimbang , bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan telah terbukti bahwa Jumsah bersama dengan terdakwa lelaki Pagiling melakukan persetubuhan dengan korban Eka Ashari, selanjutnya yang perlu di buktikan apakah Jumsah dengan terdakwa Dg.Pagiling melakukan persetubuhan tersebut dengan ancaman kekerasan atau dengan kekerasan pada korban Eka Ashari.

Menimbang , bahwa berdasarkan keterangan saksi korban Eka, dan keterangan Jumsah bahwa ia telah melakukan persetubuhan secara bergantian dengan Dg.Pagiling, kemudian di hubungkan dengan alat bukti surat *Visum et Repertum* yang menyatakan ada luka robek di vagina korban, dihubungkan pula hasil Lapsos-Assesmen Polsek Bontomarannu, bahwa sampai saat ini saksi korban masih dalam keadaan trauma, selanjutnya berdasarkan keterangan ibu saksi korban yang bernama Hayati Dg.Ngaji Binti Juma Dg.Nai bahwa ia pernah memanggil terdakwa lel.Pagiling ke Rumahnya, dan menanyakan apakah benar terdakwa bersama Jumsah pernah melakukan persetubuhan dengan Eka, maka dijawab oleh terdakwa Dg.Pagiling, bahwa benar ia telah melakukan pemaksaan pada Eka untuk melakukan persetubuhan. Hal ini bersesuaian pula dengan keterangan saksi korban Eka bahwa ia telah disetubuhi oleh Jumsah bersama terdakwa lel. Dg.Pagiling dengan cara awalnya terdakwa datang minta dibukakan pintu belakang karena ingin cuci kaki lalu saksi membuka pintu terdakwa memegang tangan saksi sehingga saksi lari kepintu depan dan pada saat membuka pintu depan sudah ada berdiri terdakwa Pagiling setelah itu

Jumsah dan terdakwa Pagiling menarik rambut dan tangan saksi masuk kedalam kamar setelah ada didalam kamar saksi memegang tangan saksi diatas kepala yang sebelumnya sudah di baringkan oleh mereka berdua lalu terdakwa Pagiling membuka celana tidur dan celana dalam saksi sampai kebetis, kemudian terdakwa Pagiling memasukkan alat kelaminnya ke alat kelamin saksi lalu terdakwa Pagiling mendorongnya keluar masuk beberapa kali sampai spermanya keluar setelah itu bergantian yaitu terdakwa Pagiling memegang tangan saksi diatas kepala lalu Jumsah memasukkan alat kelaminnya ke alat kelamin saksi lalu mendorongnya keluar masuk hingga beberapa kali sampai spermanya keluar setelah itu terdakwa pagiling mengangkat adik saksi yang masih berumur 7 bulan lalu mengancam saksi apabila memberitahu orang lain maka ia akan membunuh saksi beserta keluarga saksi.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hakim tersebut diatas maka majelis Hakim berpendapat bahwa berdasarkan alat bukti tersebut, majelis Hakim menemukan petunjuk Jumsah bersama dengan terdakwa Dg.Pagiling telah menyetubuhi saksi korban dengan cara melakukan kekerasan.

Meimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas , Majelis Hakim berpendapat perbuatan terdakwa yang melakukan persetubuhan dengan ancaman kekerasan telah terbukti.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah saksi korban Eka Ashari termasuk dalam pengertian anak atau bukan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Tentang Perlindungan Anak, Pengertian “anak” adalah seorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan, bahwa

berdasarkan ijazah sekolah dasar atas nama Eka Ashari (saksi korban), lahir pada tanggal 24 juli 1998, dengan demikian pada saat kejadian saksi korban Eka Ashari masih berusia 17 Tahun, sehingga Majelis Hakim berpendapat saksi korban dapat dikualifikasikan sebagai anak sesuai dengan pasal 1 ayat (1) UU Perlindungan anak.

Menimbang , berdasarkan uraian pertimbangan diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “ **Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain**” telah terpenuhi.

Ad. 3. Orang yang melakukan, meyuruh melakukan, atau yang turut serta melakukan perbuatan itu.

Menimbang ,bahwa unsur ketiga dalam pasal ini berupa unsur alternatif , sehingga apabila salah satu unsur telah terpenuhi, maka unsur yang lainnya tidak perlu di pertimbangkan.

Menimbang , bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa terdakwa lel. Dg.Pagiling bersama Jumsah telah melakukan kekerasan atau ancaman memaksa anak melakukan persetubuhan terhadap saksi korban Eka Ashari. Sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa Lel.Pagiling dapat dikualifikasikan sebagai orang yang turut melakukan dalam arti kata baha terdakwa Pagiling bersama Lel. Jumsah telah melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan terhadap saksi korban Eka Ashari dengan demikian unsur ketiga ini pun telah terpenuhi.

Ad. 4. Telah melakukan serangkaian perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa terdakwa lel.Pagiling melakukan persetubuhan dengan saksi korban Eka sebanyak 3 (tiga) kali. Keterangan tersebut berasal dari keterangan saksi korban Eka Ashari Bahwa terdakwa melakukan pemerkosaan terhadap saya sebanyak 3(tiga) kali, setelah kejadian magribnya (kejadian pertama), sdr.Saudara Terdakwa Kaharuddin Dg.Pagiling datang lagi kerumah besoknya dengan seorang diri sekitar pukul 12.00 dan memaksa saya lagi melakukan persetubuhan dengan mengancam kalau saya memberitahu orang saya dan adik saya akan di bunuhnya, du hari kemudian terdakwa datang lagi melakukan hal yang sama, pada saat itu orang tua saksi tidak ada karena mereka pergi kerumah yang satu bermalam.

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi korban Eka, di hubungkan dengan keterangan terdakwa yang pada pokoknya menerangkan bahwa terdakwa mengakui telah melakukan persetubuhan dengan saksi korban sebanyak 3 (tiga) kali selanjutnya dihubungkan pula dengan keterangan saksi-saksi lainnya yang saling bersesuaian, bahwa terdakwa Pagiling memiliki hubungan asmara dengan saksi korban.

Menimbang , bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas , majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan terdakwa yang melakukan persetubuhan dengan saksi korban sebanyak (tiga) kali telah dapat dipandang sebagai perbauatan yang berlanjut , dengan demikian unsure ke empat ini pun telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur pasal 81 ayat (1) UU RI No.23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak jo pasal 55 ayat (1) KUHP, jo pasal 64 (1) ke

1 KUHP. Telah terpenuhi, maka terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan , majelis hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar atau alasan pemaaf, maka terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus di jatuhkan pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang di jatuhkan;

Menimbang , bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap terdakwa alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar baju kaos kuning bercorak hitam bergambar belakang BALI, 1 (satu) lembar celana tidur panjang warna biru dan bergambar, 1 (satu) lembar celana dalam warna coklat, dan di persidangkan telah terbukti milik saksi korban Eka Ashari, maka beralasan hukum apabila barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi korban Eka Ashari.

Menimbang , bahwa sebelum sampai pada amar putusan , majelis Hakim akan mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan.

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat.
- Terdakwa berbelit-belit dalam memberikan keterangan, sehingga mempersulit jalannya persidangan.

Keadaan yang meringankan ;

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan.
- Terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang bahwa oleh karena itu terdakwa di jatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara.

Menimbang , bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, Pengadilan berependapat pidana yang dijatuhkan atas diri terdakwa sudah pantas dan sudah memenuhi rasa keadilan baik diri terdakwa maupun bagi masyarakat.

Menimbang bahwa segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan perkara ini dan belum tercantum dalam putusan ini, guna menyingkat isi putusan ini dianggap telah tercakup dan menjadi bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Memperhatikan pasal 81 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) ke 1 KUHP serta peraturan perundang-undang lainnya yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini.

f. Amar Putusan

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **Kaharuddin Dg. Pagiling Bin Dg. Sila** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“melakukan kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan yang dilakukan secara bersama-sama dan secara berlanjut”**
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 9 (Sembilan) tahun dan denda sejumlah Rp.5000.000.000,00 (lima milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1(satu) tahun
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar baju kaos kuning bercorak hitam bergambar belakang BALI
 - 1 (satu) lembar celana tidur panjang warna biru dan bergambar
 - 1 (satu) lembar celana dalam warna coklat
6. Membebankan kepada terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5000,- (lima ribu rupiah)

2. Analisis Penulis

Didalam kasus perkosaan pada putusan Nomor:06/Pid.Sus/2016/PN.Sgm merupakan kasus perkosaan yang korbannya adalah anak yaitu Pr.Eka Ashari yang berumur 17 Tahun, kategori anak dalam Pasal 1 ayat (1) UU No.35 Tahun 2014 Tentang perlindungan anak adalah sebagai berikut:

“Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan”

Dari ijazah sekolah milik Eka Ashari (saksi korban), lahir pada tanggal 24 juli 1998, pada saat kejadian saksi korban Eka Ashari masih berusia 17 Tahun, jadi korban adalah masih kategorikan sebagai seorang anak, sehingga pasal yang dikenakan pada terdakwa adalah Pasal 81 ayat (1) UU No.35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, mengatur kasus perkosaan secara lebih khusus (asas *lex specialis derogate legi generalis*), dengan ancaman pidana yang tentunya lebih berat.

Dalam pembuktian penuntut umum mengajukan alat bukti keterangan saksi yaitu saksi korban Pr.Eka Ashari dan keterangan saksi lainnya, keterangan terdakwa Kaharuddin Dg Pagiling Bin Dg Sila , surat berupa *visum et repertum* di buat oleh dokter, dan beberapa barang bukti.

Didalam *visum et Repertum* sendiri mencantumkan pemberitaan dan kesimpulan sebagai berikut :

1. Hasil Pemeriksaan :

Alat kelamin wanita

- Serambi kemaluan (*Vestibulum Vaginae*) tidak di temukan lecet kemerahan.
- Selaput dara (*hymen*) ditemukan luka robek lama pada selaput dara arah jam 1,3,6, dan 8

2.` Tindakan pemeriksaan medis

Tes kehamilan : positif (+).

Kesimpulan :

1. Telah dilakukan pemeriksaan terhadap seseorang, berjenis kelamin perempuan berusia anak
2. Selaput dara di temukan luka robek lama sesuai akibat persentuhan benda tumpul.
3. Serambi kemaluan tidak ditemukan kelainan
4. Liang Senggama tidak ditemukan kelainan
5. Tanda Kehamilan ditemukan pada saat pemeriksaan
6. Perlukaan pada bagian tubuh lainnya tidak ditemukan

Menurut penulis dalam menjatuhkan putusan, pertimbangan majelis menggunakan alat bukti keterangan saksi, *Visum et Repertum*, keterangan terdakwa dan barang bukti, bisa di lihat pada unsur pasal yang dakwakan kepada terdakwa yaitu unsur “Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain”, didalam

pertimbangannya majelis hakim berangkat dari menemukan dan menggali fakta-fakta persidangan untuk mencari kebenaran materil pada proses pemeriksaan alat bukti dengan mendengarkan keterangan saksi, keterangan terdakwa dan *Visum et Repertum* di ajukan ke persidangan.

Dari keterangan saksi korban bahwa korban Eka Ashari mengaku telah disetubuhi oleh terdakwa Kaharuddin Dg Pagiling dan Jumsah secara bergantian dengan cara dipaksa menggunakan kekerasan dengan cara awalnya terdakwa datang minta dibukakan pintu belakang karena ingin cuci kaki lalu saksi korban membuka pintu, terdakwa memegang tangan saksi korban sehingga saksi korban lari kepintu depan dan pada saat membuka pintu depan sudah ada berdiri terdakwa Kaharuddin Dg Pagiling setelah itu Jumsah dan terdakwa Kaharuddin Dg Pagiling menarik rambut dan tangan saksi korban masuk kedalam kamar, setelah ada didalam kamar saksi memegang tangan saksi diatas kepala yang sebelumnya sudah di baringkan oleh mereka berdua lalu terdakwa Kaharuddin Dg Pagiling membuka celana tidur dan celana dalam saksi korban sampai kebetis, kemudian terdakwa Kaharuddin Dg Pagiling memasukkan alat kelaminnya ke alat kelamin saksi lalu terdakwa Kaharuddin Dg Pagiling mendorongnya keluar masuk beberapa kali sampai spermanya keluar setelah itu bergantian yaitu terdakwa Pagiling memegang tangan saksi diatas kepala lalu Jumsah memasukkan alat kelaminnya ke alat kelamin saksi korban lalu mendorongnya keluar masuk hingga beberapa kali sampai spermanya keluar setelah itu terdakwa pagiling mengangkat adik saksi yang masih berumur 7 bulan lalu mengancam saksi apabila memberitahu orang lain maka ia akan membunuh saksi beserta keluarga saksi korban.

Kemudian rangkaikan dari keterangan saksi jumsah mengakui bahwa dirinya bersama terdakwa Kaharuddin Dg Pagiling telah menyetubuhi korban secara bergantian. Kemudian Keterangan Terdakwa Kaharudiin Dg Pagiling mengakui bahwa benar dirinya telah melakukan persetubuhan dengan korban dan memiliki hubungan asmara. Di rangkaikan dengan dari keterangan ibu dan saksi korban yang bernama Hayati Dg.Ngaji Binti Juma Dg.Nai bahwa ia pernah memanggil terdakwa lel.Pagiling ke Rumahnya, dan menanyakan apakah benar terdakwa bersama Jumsah pernah melakukan persetubuhan dengan Eka, maka dijawab oleh terdakwa Dg.Pagiling, bahwa benar ia telah melakukan pemaksaan pada Eka untuk melakukan persetubuhan.

Kemudian dari keterangan saksi Jumsah yang mengakui bahwa dia dan terdakwa Kaharuddin Dg Pagiling pernah melakukan persetubuhan terhadap dengan paksaan kepada korban namun dia melakukannya hanya sekali, dan dari hasil visum tersebut ditemukan beberapa keterangan bahwa selaput dara korban di temukan robek akibat persentuhan benda tumpul, korban sedang hamil dan juga korban adalah seorang perempuan berusia anak, majelis hakim menghubungkan dengan alat bukti lain yaitu keterangan saksi korban Eka Ashari mengakui telah di perkosa oleh Terdakwa Kaharuddin Dg Pagiling bersama Jumsah.

Dari keterangan-keterangan ini memiliki saling keterkaitan satu sama lain, di mulai keterangan saksi ,keterangan terdakwa , dan hingga *Visum et Repertum* yang memuat informasi bahwa korban keadaan hamil, korban adalah seorang anak, dan adanya luka robek lama pada kemaluan dalam. Serta terdapat pula hasil Lapsos-Assesmen Polsek Bontomarannu, bahwa sampai saat ini saksi korban masih dalam

keadaan trauma. Antara alat bukti satu dan alat bukti yang lain memiliki keterkaitan sehingga memberi petunjuk kepada majelis hakim bahwa Jumsah dan Terdakwa Kaharuddin Dg Pagiling telah menyetubuhi korban dengan melakukan kekerasan.

Dengan demikian hakim yakin terdakwa benar bersalah telah melakukan tindak pidana perkosaan bisa di lihat dari putusan hakim pada terdakwa yaitu di jatuhkan hukuman dengan pidana penjara 9 (sembilan) Tahun dan denda sejumlah Rp.5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1(satu) tahun .

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat dirumuskan beberapa kesimpulan sebagai berikut :

1. Aturan Hukum tentang *Visum et Repertum* sebagai pembuktian tindak pidana perkosaan terdapat pada pasal 184 ayat (1) huruf c lalu secara khusus dalam 187 huruf c KUHAP. *Visum et Repertum* memiliki posisi yang cukup fundamental karena termasuk dalam alat bukti surat yang sah dan berkekuatan hukum, karena telah diatur dan dibenarkan oleh undang-undang. Dalam kasus perkosaan visum memiliki peran penting sebagai alat bukti untuk membuka terang menderang suatu kasus khususnya perkosaan karena memuat pemberitaan untuk membuktikan dakwaan dan memperkuat keyakinan hakim, namun visum bukanlah alat bukti satu-satunya, tapi harus dirangkaikan dengan alat bukti lainnya.
2. Pengaruh *Visum et repertum* terhadap pertimbangan hakim memiliki keterkaitan satu sama lain. Dan terbukti dalam penerapannya di PN Sungguminasa, hakim memutus dengan pertimbangan keterangan visum dan terdakwa di putus bersalah atas perbuatannya dari hasil analisis penulis pada putusan nomor 06/Pid.Sus/2016/PN.Sgm. Alat bukti surat *visum et repertum* memiliki keterikatan atau pengaruh terhadap pertimbangan hakim dapat dilihat jika hakim meyetujui atau menerima hasil riwayat pemeriksaan dan pemberitaan kesimpulan dari *visum et repertum*, kemudian hasil itu di

sertakan atau dirangkaikan dengan alat bukti lain, sehingga majelis hakim yakin bahwa telah terjadi tindak pidana perkosaan dan terdakwa yang bersalah telah melakukannya.

B. Implikasi Penelitian

1. Visum harusnya dilakukan pada setiap dugaan kasus perkosaan, tindakan visum terhadap perkosaan harusnya dilakukan seketika atau tidak waktu yang lama setelah terjadinya perkosaan karena visum dapat di jadikan rujukan untuk pertimbangan hakim nantinya di persidangan khususnya kasus perkosaan yang memiliki alat bukti yang sedikit *minimum evidence*.
2. Hakim seharusnya mempertimbangkan keterangan yang termuat dalam *Visum et Repertum* karena selain merupakan alat bukti surat yang sah menurut undang-undang juga merupakan hasil pemeriksaan dari seorang dokter yang berdasarkan keilmuannya yang bernilai objektif.

DAFTAR PUSTAKA

A. Sumber Buku

- Amir, Amri, *Rangkaian Ilmu Kedokteran Forensik* Edisi kedua Ramadhan Medan 2005
- Bakhri, Syaiful, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, Pustaka Pelajar Yogyakarta 2015
- Bakhri, Syaiful, *Hukum Pembuktian Dalam Praktik Peradilan Pidana* Total Media, bekerja sama dengan P3IH Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jakarta Yogyakarta 2009
- Chazawi, Adami, *Tindak Pidana mengenai kesopanan*, PT Rajagrafindo persada Jakarta 2007
- Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahnya* CV. Karya Insan Indonesia Jakarta 2002
- Djamali R. Abdoel, *Pengantar Hukum Indonesia* Edisi Revisi PT RajaGrafindo Persada 2012
- Hamzah. Andi, *Hukum Acara Pidana Indonesia* Cetakan Ketiga Jakarta 2004
- Harahap M. Yahya, *“Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali”* Edisi Kedua Sinar Grafika Jakarta 2003
- Hiariej, Eddy O.S *Teori & Hukum Pembuktian* Penerbit Erlangga Jakarta 2012
- Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa* Edisi Keempat PT. Gramedia Pustaka Utama 2008
- Lamintang, P.A.F., Theo Lamintang, *Delik-delik Khusus Kejahatan Melanggar Noma Kesusilaan & Norma Kepatuhan* Jakarta Sinar Grafika 2009
- Maramis, Frans *Hukum Pidana Umum dan Tertulis di Indonesia* Jakarta Rajawali Pers, 2013
- Purwadianto, Agus, Budi Sampurna Herkutanto, *Kristal-Kristal Ilmu Kedokteran Forensik*, Bagian Ilmu Kedokteran Forensik FKUI/LKUI Jakarta 1981
- Sudarsono, *Pengantar Tata Hukum Indonesia* (Jakarta: Sinar PT Rineka Cipta, 2003)
- Soeparmono, R., *Keterangan Ahli & Visum Et Repertum dalam Aspek Hukum Acara Pidana* CV. Mandar Maju Bandung 2011
- Syamsuddin, Rahman dan Ismail Aris *Merajut Hukum Di Indonesia* Mitra Wacana Media Jakarta 2014

Syamsuddin ,Rahman, *Hukum acara Pidala dalam integrasi keilmuan* Alauddin University Press Makassar 2013

Usman ,Husaini dkk, *Metode Penelitian Sosial* (Cet v, Jakarta: PT Bumi Aksara, 2004

Pandu,Putra Dimas , *Kekuatan Hukum Visum et Repertum dalam tindak Pidana Perkosaan Terhadap Anak Kandung (Incest) (Tinjauan Yuridis terhadap putusan Nomor: 124/Pid.Sus/2009/PN.Bms)* Skripsi.Purwokerto :Fakultas Hukum Universitas Jendral Sudirman

Waluyo,Bambang *Sistem Pembuktian Dalam Peradilan Indonesia* Sinar Grafika Jakarta

Zaidan,M.Ali ,*Menuju Pembaharuan Hukum Pidana* Jakarta:Sinar Grafika 2015

B. Sumber Undang-Undang

Republik Indonesia, *Undang-Undang RI No.8 Tahun 1981 Tentang Acara Pidana* Laksana Jakarta 2014

Republik Indonesia, *Undang-Undang RI No.35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak* Sinar Grafika Jakarta 2016

C. Sumber Internet

Amin ,Rahman, *Kebijakan Hukum Pidana Tindak Pidana Perkosaan di Indonesia* <http://rahmanamin1984.blogspot.co.id/2015/01/kebijakan-hukum-pidana-tindak-pidana.html> di akses pada pukul 11 : 37 WITA 28 Nov 2016

Amahoru ,Ibnu Kasir, “Setahun,Kasus Pencabulan dan Pemerkosaan di Sulsel Meningkat”,*Rakyatku.com* 31Desember 2016 ,<http://news.rakyatku.com/read/33315/2016/12/31/setahun-kasus-pencabulan-dan-pemerkosaan-di-sulsel-meningkat> (29 Maret 2017)

Mahkamah Agung “Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia” <https://putusan.mahkamahagung.go.id/> (12 April 2017)



LAMPIRAN-LAMPIRAN

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R

SURAT PERMOHONAN PENGAJUAN JUDUL SKRIPSI

Hal : Permohonan Judul Skripsi.

Kepada Yth,

Ketua Jurusan/Program Studi

Ilmu Hukum

Fakultas Syari'ah dan Hukum

Di-

Samata-Gowa.

Assalamu Alaikum Wa. Wa.

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Rezeky Setyawan Amir

Nim : 10500113027

Semester/Klpk : VII (Tujuh)/A

Angkatan : 2013

Dengan ini mengajukan permohonan judul skripsi sebagai berikut :

1. Peranan Kejaksaan dalam penuntutan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum
 2. Tinjauan Yuridis CCTV Sebagai barang bukti yang sah dalam persidangan
 - Acc. ③ Peranan Visum et repetrum sebagai alat bukti dalam surat dakwaan
- Demikian permohonan ini saya ajukan, atas perhatian dan persetujuannya saya ucapkan terima kasih. *Waassalamu Alaikum Wa. Wa.*

Pallangga, 31 Oktober 2016

Mengetahui,


Penasehat Akademik

Pemohon,


(Dr. Hamsir, S.H., M.Hum)

3/11/16


(Rezeky Setyawan Amir)


Rezeky Setyawan Amir



KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UIN ALAUDDIN MAKASSAR
 Nomor : 716 Tahun 2016
TENTANG DOSEN PEMBIMBING DRAF/SKRIPSI
TAHUN 2016

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Alauddin Makassar setelah :

- Menimbang** : a. Bahwa penulisan karya ilmiah (skripsi) merupakan salah satu persyaratan pada Jenjang strata satu (S1) Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Alauddin Makassar, Untuk itu dipandang perlu menetapkan dosen pembimbing;
- b. Bahwa mereka yang tersebut namanya pada surat keputusan ini dipandang cakap dan memenuhi syarat untuk di angkat dan disertai tugas sebagai dosen Pembimbing Draft/Skripsi.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan pemerintah RI. Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan
3. Peraturan Menteri Agama RI. Nomor 20 Tahun 2014 tentang Statuta UIN Alauddin Makassar
4. Peraturan Menteri Agama RI. Nomor 85 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata kerja UIN Alauddin Makassar
5. Keputusan Rektor UIN Alauddin Makassar Nomor 129 C Tahun 2013 tentang Pedoman Edukasi UIN Alauddin Makassar.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : a. Menunjuk saudara : **1. Dr. Hamsir., SH., M.Hum**
2. Dr. Fadli A. Natsif., SH. M.H

Sebagai pembimbing mahasiswa :

Nama : Rezeky Setyawan Amir
 N I M : 10500113027
 Fakultas/Jurusan : Syari'ah dan Hukum / Ilmu Hukum
 Judul Skripsi : **"Kekuatan Hukum Visum et Repetrum Sebagai Alat Bukti Tindak Pidana Perkosaan".**

- b. Melaksanakan pembimbing Skripsi sampai mahasiswa tersebut menyelesaikan penulisan karya ilmiah secara profesional;
- c. Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya Surat keputusan ini dibebankan kepada Anggaran DIPA/APBN/PNBP UIN Alauddin Makassar Tahun 2016
- d. Surat keputusan disampaikan kepada masing-masing yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Ditetapkan di : Samata
 Pada tanggal : 14 Desember 2016



Prof. Dr. Darussalam Svamsuddin, M.Ag
 NIP. 19621016 199003 1 003

“KEKUATAN HUKUM VISUM ET REPETITUM SEBAGAI ALAT BUKTI TINDAK
PIDANA PERKOSAAN”

Cs. h. l. k. n. s. 1608. P. N. Syamsir (2010) 2016/12/16.

1. Dr. Hamsir SH. MH.
2. Dr. Fadli A. Katsir. SH. MH.



RAHMAN SYAMSUDDIN, SH., MH.
NIP. 19821207 200901 1 010

Proposal Skripsi

Di ajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Meraih Gelar

Sarjana Hukum (SH) Jurusan Ilmu Hukum

Pada Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri

(UIN) Alauddin Makassar

Oleh :

REZEKY SETYAWAN AMIR
NIM.10500113027

FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
UIN ALAUDDIN MAKASSAR**

2016

ALAUDDIN
MAKASSAR



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

*Kampus I Jl. Slt. Alauddin No. 63 Makassar Tlp. (0411) 864924 Fax 864923
Kampus II Jl. Slt. Alauddin No. 36, Sungguminasa-Gowa Tlp. (0411) 424835 Fax 424836*

Nomor : 1166 / SL.3A/PP.00.9/ 03/2017
Lampiran : 1 (satu) Lembar
Hal : Undangan Seminar Draft Skripsi

An. **Rezeky Setyawan Amir / 10500113027**

Kepada Yth;

1. Dr. Hamsir., SH., M.Hum
2. Dr. Fadli Andi. Natsif., SH., M.H

Sebagai Pembimbing I.
Sebagai Pembimbing II.

Di-
Samata

Bertindak selaku **Pembimbing** pada **Seminar Draft Skripsi**, yang insya Allah akan dilaksanakan pada:

Hari/Tanggal : Kamis, 16- Maret 2017
Waktu : 09.00 WITA - selesai
Tempat/Ruangan : Ruang Jurusan Ilmu Hukum
Judul Skripsi : “ **Kekuatan Hukum Visum Et Repertum Sebagai Pembuktian Tindak Pidana Perkosaan (Studi Kasus Pengadilan Negeri Sungguminasa 2010-2016)**”

Atas segala perhatian dan kehadirannya diucapkan banyak terima kasih

Samata, 14 Maret 2017

Wassalam,
Ketua Jurusan Ilmu Hukum

Istiqamah. SH., MH.
NIP. 19680120 199503 2 001

Catatan :

- SK Pembimbing Draft Skripsi terlampir
- Pembimbing diharapkan hadir

**LEMBAR PENGESAHAN
DRAFT SKRIPSI**

**“Kekuatan Hukum Visum et Repertum Sebagai Pembuktian Tindak Pidana Perkosaan
(Studi Kasus Pengadilan Negeri Sungguminasa)”**

Disusun dan Diajukan Oleh

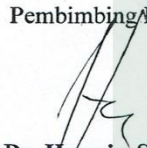
**Rezeky Setyawan Amir
NIM : 10500113027**

Telah disetujui oleh Pembimbing untuk melanjutkan
Penulisan skripsi

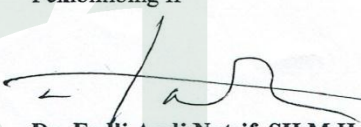
Pada tanggal : 30 Maret 2017

DOSEN PEMBIMBING

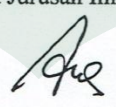
Pembimbing I


Dr. Hamsir, SH.M.Hum
NIP. 196104041993031005

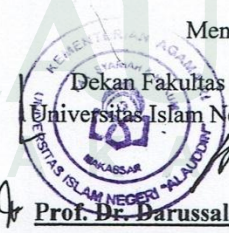
Pembimbing II

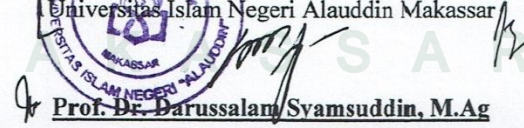

Dr. Fadli Andi Natsif, SH.M.H
NIP. 196610162014111001

Diketahui Oleh
Ketua Jurusan Ilmu Hukum


Istiqamah, SH., MH
NIP: 19680120 199503 2 001

Mengesahkan


**Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar**


Prof. Dr. Darussalam Svamsuddin, M.Ag
NIP: 19621016 199003 1 003



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Kampus 1 Jln. Sultan Alauddin No. 63 Telp (0411) 864928-864931 (Fax. 864923)
 Kampus 2 Jl. Sultan Alauddin No.36 SamataSungguminasa-Gowa.Tlp.(0411)424835 Fax 424836

Nomor : 1565 SI.1/PP.00.9/03/2017
 Lamp : 1 (satu) exemplar
 Hal : **PERMOHONAN IZIN PENELITIAN**

Samata 30 Maret 2017

Kepada
 Yth.Ketua Pengadilan Negeri Sungguminasa
 Di-
 Kab. Gowa

Assalamu 'AlaikumWr.Wb.

Dengan hormat disampaikan bahwa mahasiswa UIN Alauddin Makassar yang tersebut namanya dibawah ini :

Nama : Rezeky Setyawan Amir
 N I M : 10500113027
 Fakultas/Jurusan : Syari'ah dan Hukum / Ilmu Hukum
 Semester : VIII (Delapan)
 Alamat : BTN Pelita Asri ,Gowa

Bermaksud melakukan penelitian dalam rangka penyusunan skripsi sebagai salah satu syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana.Adapun Judul Skripsi yaitu :


“Kekuatan Hukum Visum et Repertum sebagai Pembuktian Tindak Pidana Perkosaan (Studi Kasus Pengadilan Negeri Sungguminasa) ”

Dengan dosen pembimbing:

1. **Dr. Hamsir.,SH.M.Hum**
2. **Dr. Fadli Andi Natsif.,SH.M.H**

Sehubungan dengan hal tersebut, kami mengharapkan mahasiswa yang bersangkutan dapat diizinkan untuk melakukan penelitian di Kantor Pengadilan Negeri Sungguminasa terhitung mulai tanggal 10 April 2017 – 10 Mei 2017

Demikian harapan kami dan terimakasih.
 Wassalamu 'AlaikumWr.Wb.

Wassalam
 An. Rektor
 Dehan

Prof. Dr. Darussalam Syamsuddin, M.Ag
 NIP. 19621016 199003 1 003

Tembusan:
 Yth. Rektor UIN Alauddin Makassar di Samata-Gowa

DAFTAR PERTANYAAN WAWANCARA

LOKASI PENELITIAN : Pengadilan Negeri Sungguminasa

Biadata Narasumber

Nama : AMIRUDDIN MAHMUD, SH, MA
 NIP : 19830910 200704 1001
 Tempat tanggal lahir : PINRANG, 10 SEPTEMBER 1983
 Jabatan : Hakim
 Pangkat/Gol : Hakim Pratama Madya / IIIc
 Tanggal :/...../2017

• Riwayat Pendidikan :

- SD NEG. INP. 171 LOKA KAB. BULUKUMBA
- SLTP NEG. 2 KABUPATEN BULUKUMBA
- SMA NEG. 5 MAKASSAR
- FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS HASANUDDIN
- PASCA SARJANA UNIVERSITAS HASANUDDIN

• Riwayat Jabatan :

- 2007 - 2010 CAJON HAKIM PN MAKASSAR
- 2010 - 2013 HAKIM PN ENREHANG
- 2013 - 2016 HAKIM PN PANGKAJENE (PANGKEP)
- 2016 - sekarang HAKIM PN SUNGGUMINASA



PENGADILAN NEGERI SUNGGUMINASA

JALAN USMAN SALENGKE NO. 103 TELP. (0411) 861129-861089
SUNGGUMINASA - KABUPATEN GOWA 92111

SURAT KETERANGAN

Nomor : W22.U3 / 43 / HK / IV / 2017

Yang bertanda tangan di bawah ini, Panitera Muda Hukum Pengadilan Negeri Sungguminasa, menerangkan bahwa :

N a m a	: Rezeky Setyawan Amir
Nomor Induk Mahasiswa	: 10500113027
Fakultas/Jurusan	: Syari'ah dan Hukum/Ilmue Hukum
Jenis kelamin	: Laki-laki
Fakultas/Universitas	: Fakultas Syari'ah dan Hukum / Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.
A l a m a t	: BTN Pelita Asri, Gowa.

Telah melakukan Penelitian pada Kantor Pengadilan Negeri Sungguminasa, dalam rangka penyusunan Skripsi dengan judul "*Kekuatan Hukum Visum et Repertum sebagai Pembuktian Tindak Pidana Perkosaan*". (*Studi Kasus Pengadilan Negeri Sungguminasa*).

Demikian surat ini dibuat dan diberikan kepada Peneliti tersebut diatas untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Sungguminasa, 20 April 2017.

PENGADILAN NEGERI SUNGGUMINASA
PANITERA MUDA HUKUM



Abd. Latif SH.
NIP. 19650920 199003 1 002

Tembusan :

- Arsip



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

*Kampus I : Jalan Sultan Alauddin No. 63 Tlp (0411) 864928-864930 Fax. 864923
Kampus II : Jl. H. M. Yasin Limpo No. 36 Samata Sungguminasa – Gowa Telp. 841879 Fax 8221400*

**KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UIN ALAUDDIN MAKASSAR**

Nomor : 383 Tahun 2017

T E N T A N G

**PANITIA, PENGUJI DAN PESERTA UJIAN AKHIR PROGRAM STUDI (KOMPREHENSIF)
TAHUN 2017**

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar setelah :

- Membaca** : Surat permohonan mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar Tingkat Akhir Jurusan/Program Studi Ilmu Hukum tanggal 7 April 2017 perihal Ujian Akhir Program Studi/Komprehensif.
- Menimbang** : a. Bahwa untuk kelancaran pelaksanaan Ujian Akhir Program Studi/Komprehensif, maka dipandang perlu menetapkan Panitia, Penguji dan Peserta Ujian;
b. Bahwa mereka yang tersebut namanya pada lampiran Surat Keputusan ini dipandang cakap dan memenuhi syarat untuk diangkat dan disertai tugas sebagai Panitia, Penguji dan Peserta Ujian.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah No. 04 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
3. Peraturan Presiden RI. Nomor 57 Tahun 2005 tentang Perubahan Status IAIN Alauddin Makassar menjadi UIN Alauddin Makassar;
4. Keputusan Menteri Agama RI. Nomor 289 Tahun 1993 Jo Nomor 202 B Tahun 1998 tentang Pemberian Kuasa dan Wewenang Menandatangani Surat Keputusan;
5. Peraturan Menteri Agama RI. Nomor 2 Tahun 2006 tentang Mekanisme Pelaksanaan Pembayaran atas Bebas Anggaran dan Belanja Negara di Lingkungan Departemen Agama;
6. Peraturan Menteri Agama RI No. 20 tahun 2014 tentang Statuta UIN Alauddin Makassar.
7. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 25 Tahun 2013 Juncto Peraturan Menteri Agama RI Nomor 85 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja UIN Alauddin Makassar.
8. Keputusan Rektor UIN Alauddin Makassar Nomor 200 Tahun 2016 tentang Pedoman Edukasi UIN Alauddin Makassar.

M E M U T U S K A N

Menetapkan : **KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM UIN ALAUDDIN MAKASSAR TENTANG PANITIA, PENGUJI DAN PESERTA UJIAN AKHIR PROGRAM STUDI/KOMPREHENSIF**

- Pertama** : Menetapkan **Panitia, Penguji dan Peserta** Ujian Akhir Program Studi/Komprehensif;
Kedua : **Tugas Panitia** mempersiapkan segala instrumen yang berkaitan dengan Ujian Akhir Program Studi/Komprehensif;
Ketiga : **Tugas Penguji** melaksanakan Ujian Akhir Program Studi/Komprehensif;
Keempat : **Tugas Panitia dan Penguji** dianggap selesai setelah berakhirnya Ujian Akhir Program Studi/Komprehensif;
Kelima : Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya **Surat Keputusan** ini dibebankan kepada Anggaran DIPA/APBN/PNBP UIN Alauddin Makassar Tahun 2017;
Keenam : **Surat Keputusan** ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan di dalamnya akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

SURAT KEPUTUSAN ini disampaikan kepada masing-masing yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Ditetapkan di : Samata
Pada tanggal : 7 April 2017



Dr. Darussalam Syamsuddin, M.Ag
NIP. 19620116 199003 1 003

Tembusan :
Yth. Rektor UIN Alauddin Makassar di Samata – Gowa

Lampiran :

**SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM UIN ALAUDDIN MAKASSAR
NOMOR : 383 TAHUN 2017
TENTANG**

PANITIA, PENGUJI DAN PESERTA UJIAN AKHIR PROGRAM STUDI/KOMPREHENSIF

NO	NAMA/NIM	TEAM PENGUJI			PELAKSANA KETUA/SEK/ANG.
		MKD/FIKIH & USUL FIKIH	MKD/UDIS	MKIP	
1	Andi Khaedir K Petta Lalo 10500113041	Prof. Dr. Darussalam, M.Ag	Dr. Kurniati, M.Hi	Dr. Hamsir, M.Hum	Dr. H. M. Saleh Ridwan, M.Ag Mujahidah, SE Nurhayati Wahid
2	Wiwi Wardani 10500113003	Dr. H. Abd. Halim Talli, M.Ag.	Dr. Sohras, M.Ag	Dr. A. Syafriani, M.H	Dr. Hamsir, M.Hum Drs. Aminullah Nasirah Asri, S.Kom
3	Zulfadli 10500113044	Dr. H. M. Saleh Ridwan, M.Ag	Dr. Dudung Abdullah, M.Ag	Rahman Syamsuddin, S.H M.H	Dr. H. Abd. Halim Talli, M.Ag. Drs. Aminullah Nasirah Asri, S.Kom
4	Aliyyul Qayyum Nugraha 1050013177	Dr. M. Thahir Maliko, M.Hi	Dr. Darsul S. Puyu, M.Ag	Ahkam Jayadi, S.H, M.H	Dr. H. M. Saleh Ridwan, M.Ag Drs. Aminullah Nurhayati Wahid
5	Rezeky Setyawan Amir 10500113027	Dr. Hj. Rahmatiah HL, MPd	Dr. Nur Taufik Sanusi, M.,Ag	Ashabul Kahfi, S.Ag, M.H	Dr. H. Abd. Halim Talli, M.Ag. Drs. Aminullah Nurhayati Wahid
6	Irma Suriani 10500113005	Dra. Hj. Hartini Tahir, M.Hi	Prof. Dr. Achmad Abubakar, M.Ag	Dr. Jumadi, M.H	Dr. H. Abd. Halim Talli, M.Ag. Drs. Aminullah Nurhayati Wahid

Samata, 7 April 2017



Dr. Darussalam Syamsuddin, M.Ag

19421016 199003 1 003

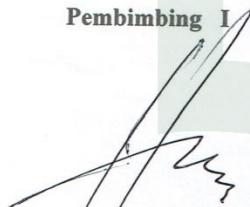
PERSETUJUAN PEMBIMBING

Pembimbing penulisan skripsi Saudara **Rezeky Setyawan Amir**, NIM: 10500113027, mahasiswa Jurusan Ilmu Hukum pada Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar, setelah meneliti dan mengoreksi secara seksama skripsi berjudul “Kekuatan Hukum Visum et Repertum sebagai Pembuktian Tindak Pidana Perkosaan (Studi Kasus Pengadilan Negeri Sungguminasa)”, memandang bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah dan dapat disetujui untuk diseminarkan.

Demikian persetujuan ini diberikan untuk diproses lebih lanjut.

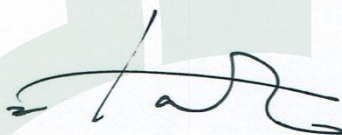
Makassar, 22 Mei 2017

Pembimbing I



Dr. Hamsir, SH.M.Hum
NIP.196104041993031005

Pembimbing II



Dr. Fadli Andi Natsif, SH.M.H
NIP.196610162014111001

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

*Kampus I : Jalan Sultan Alauddin No. 63 Tlp (0411) 864928-864930 Fax. 864923
 Kampus II : Jl. H. M. Yasin Limpo No. 36 Samata Sungguminasa – Gowa Telp. 841879 Fax 8221400*

KEPUTUSAN
DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM UIN ALAUDDIN MAKASSAR
 Nomor : 233 Tahun 2017
T E N T A N G
PANITIA DAN PENGUJI UJIAN SEMINAR HASIL/SKRIPSI
TAHUN 2017

Dekan Fakultas Syaria'ah dan Hukum UIN Alauddin Makassar setelah :

- Membaca** : Surat Permohonan :
 Nama : Rezeky Setyawan Amir
 N I M : 10500113027
 Jurusan : Ilmu Hukum
 Hari/Tanggal : Jum.at, 2 Juni 2017
 Prihal : Ujian Seminar Hasil/Skripsi
 Judul : "Kekuatan Hukum Visum Et Repertum Sebagai Pembuktian Tindak Pidana Perkosaan (Studi Kasus Pengadilan Negeri Sungguminasa)"
- Menimbang** : a. Bahwa mahasiswa tersebut di atas telah memenuhi persyaratan dan ketentuan Ujian Seminar Hasil/Skripsi;
 b. Bahwa dengan terpenuhinya persyaratan dan ketentuan di atas, maka perlu ditunjuk Panitia dan Dosen Penguji;
 c. Bahwa mereka yang tersebut namanya pada lampiran Surat Keputusan ini dipandang cakap dan memenuhi syarat untuk diserahi tugas melaksanakan kegiatan dimaksud.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Peraturan Pemerintah RI Nomor 04 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 3. Keputusan Menteri Agama RI. Nomor 289 Tahun 1993 Jo Nomor 202 B Tahun 1998 tentang Pemberian Kuasa dan Wewenang Manandatangani Surat Keputusan;
 4. Keputusan Menteri Agama RI. Nomor 20 Tahun 2014 tentang Statuta UIN Alauddin Makassar;
 5. Peraturan Menteri Agama RI. Nomor 25 Tahun 2013 Junto Peraturan Menteri Agama RI Nomor 85 tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja UIN Alauddin Makassar;
 6. Keputusan UIN Rektor UIN Alauddin Makassar Nomor 200 Tahun 2016 tentang Pedoman Edukasi UIN Alauddin Makassar.
- MEMUTUSKAN**
- Menetapkan** :
Pertama : Membentuk Panitia dan Penguji Ujian Seminar Hasil/Skripsi Fakultas Syaria'ah dan Hukum UIN Alauddin Makassar dengan komposisi sebagai berikut :
- Ketua : Prof. Dr. Darussalam Syamsuddin, M.Ag
 Sekretaris : Rahman Syamsuddin, S.H., M.H.
 Penguji I : Dr. Jumadi, S.H, M.H.
 Penguji : Ashar Sinilele, S.H, M.H.
 Pelaksana : 1. Mujahidah, SE
 2. Nurhayati Wahid
- Kedua** : Panitia bertugas mempersiapkan penyelenggaraan Ujian Seminar Hasil/Skripsi
Ketiga : Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya Surat Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran DIPA/APBN/PNBP UIN Alauddin Makassar Tahun 2017;
Keempat : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkannya dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan di dalamnya akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Keputusan ini disampaikan kepada masing-masing yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Ditetapkan di : Samata
 Pada tanggal : 30 Mei 2017
 Dekan

 Prof. Dr. Darussalam Syamsuddin, M.Ag
 NIP. 19621016 199003 1 003

Tembususan
 Yth. Rektor UIN Alauddin Makassar di Samata – Gowa;



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Kampus I : Jalan Sultan Alauddin No. 63 Tlp (0411) 864928-864930 Fax: 864923
Kampus II : Jl. H. M. Yasin Limpo No. 36 Samata Sungguminasa – Gowa Telp. 841879 Fax 8221400

Nomor : *1971*/SI.1/PP.00.9/ *J.* /2017
 Sifat : Penting
 Lamp : -
 Hal : **UNDANGAN SEMINAR HASIL**

Samata, 30 Mei 2017

Kepada

- Yth.* 1. Prof. Dr. Darussalam Syamsuddin, M.Ag. (Ketua)
 2. Rahman Syamsuddin, S.H., M.H. (Sekertaris)
 3. Dr. Jumadi, M.H. (Penguji I)
 4. Ashar Sinilele, S.H, M.H. (Penguji II)
 5. Dr. Hamsir, M.Hum. (Pembimbing I)
 6. Dr. Fadli A. Natsif, M.H. (Pembimbing II)
 7. Pelaksana.

Di
 Makassar

Assalamu 'Alaikum Wr. Wb.

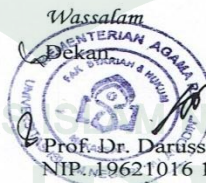
Dengan hormat, disampaikan bahwa Ujian Seminar Hasil/Skripsi atas nama :

Nama : Rezeky Setyawan Amir
 N I M : 10500113027
 Jurusan : Ilmu Hukum

Untuk maksud tersebut, maka kami mengundang Saudara/(i) pada Ujian Seminar Hasil/Skripsi, Insya Allah dilaksanakan pada :

Hari/Tanggal : Jum,at 2 Juni 2017
 Waktu : Pukul 09.00-10.00 Wita
 Tempat : Ruang Jurusan IH

Atas perhatian dan kehadirannya diucapkan terima kasih.



Prof. Dr. Darussalam Syamsuddin, M.Ag.
 NIP. 19621016 199003

PERSETUJUAN PENGUJI DAN PEMBIMBING

Penguji Penulisan skripsi saudara **REZEKY SETYAWAN AMIR**, NIM. **10500113027**, Mahasiswa program studi **Ilmu Hukum** pada **Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar**, setelah meneliti dan mengoreksi secara seksama skripsi yang berjudul **"KEKUATAN HUKUM VISUM ET REPERTUM SEBAGAI PEMBUKTIAN TINDAK PIDANA PERKOSAAN (Studi Kasus Pengadilan Negeri Sungguminasa)"**, memandang bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah dan dapat disetujui untuk diajukan ke sidang Munaqasyah.

Demikian Persetujuan ini diberikan untuk proses selanjutnya.

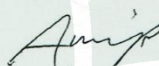
Samata, 7 Juni 2017

Penguji I



Dr. Jumadi, S.H., M.H
NIP. 196302041994031003

Penguji II




Azhar Sinilele, S.H., M.H
NIP. 196907172014111001

Pembimbing I



Dr. Hamsir, S.H., M.Hum
NIP. 196104041993031005

Pembimbing II



Dr. Fadli Andi Natsif, S.H., M.H
NIP. 196610162014111001



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

*Kampus I : Jalan Sultan Alauddin No. 63 Tlp (0411) 864928-864930 Fax 864923
 Kampus II : Jl. H. M. Yasin Limpo No. 36 Samata Sungguminasa – Gowa Telp. 841879 Fax 8221400*

KEPUTUSAN
DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM UIN ALAUDDIN MAKASSAR
 Nomor : 722 Tahun 2017
TENTANG
PANITIA DAN PENGUJI UJIAN MUNAQASYAH/SKRIPSI
TAHUN 2017

Dekan Fakultas Syaria'ah dan Hukum UIN Alauddin Makassar setelah :

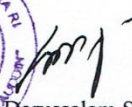
- Membaca** : Surat Permohonan :
 Nama : Rezeky Setyawan Amir
 N I M : 10500113027
 Jurusan : Ilmu Hukum
 Hari/Tanggal : Kamis, 15 Juni 2017
 Prihal : Ujian Munaqasyah/Skripsi
 Judul : "Kekuatan Hukum Visum Et Repertum Sebagai Pembuktian Tindak Pidana Perkosaan (Studi Kasus Pengadilan Negeri Sungguminasa)"
- Menimbang** : a. Bahwa mahasiswa tersebut di atas telah memenuhi persyaratan dan ketentuan Ujian Munaqasyah/Skripsi;
 b. Bahwa dengan terpenuhinya persyaratan dan ketentuan di atas, maka perlu ditunjuk Panitia dan Dosen Penguji;
 c. Bahwa mereka yang tersebut namanya pada lampiran Surat Keputusan ini dipandang cakap dan memenuhi syarat untuk diserahi tugas melaksanakan kegiatan dimaksud.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Peraturan Pemerintah 04 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 3. Keputusan Menteri Agama RI. Nomor 289 Tahun 1993 Jo Nomor 202 B Tahun 1998 tentang Pemberian Kuasa dan Wewenang Manandatangani Surat Keputusan;
 4. Keputusan Menteri Agama RI. Nomor 20 Tahun 2014 tentang Statuta UIN Alauddin Makassar;
 5. Peraturan Menteri Agama RI. Nomor 25 Tahun 2013 Junto Peraturan Menteri Agama RI No. 85 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja UIN Alauddin Makassar;
 6. Keputusan UIN Rektor UIN Alauddin Makassar Nomor 200 Tahun 2016 tentang Pedoman Edukasi UIN Alauddin Makassar.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
Pertama : Membentuk Panitia dan Penguji Ujian Munaqasyah/Skripsi Fakultas Syaria'ah dan Hukum UIN Alauddin Makassar dengan komposisi sebagai berikut :
- Ketua : Prof. Dr. Darussalam Syamsuddin, M.Ag
 Sekretaris : Istiqamah, S.H., M.H.
 Penguji I : Dr. Jumadi, S.H., M.H.
 Penguji II : Ashar Sinilele, S.H., M.H.
 Pelaksana : 1. Mujahidah, SE
 2. Nurhayati Wahid

- Ketiga** : Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya Surat Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran DIPA/APBN/PNBP UIN Alauddin Makassar Tahun 2017;
Keempat : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkannya dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan di dalamnya akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Keputusan ini disampaikan kepada masing-masing yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Ditetapkan di : Samata
 Pada tanggal : 12 Juni 2017
 Dekan

 Prof. Dr. Darussalam Syamsuddin, M.Ag
 NIP. 19621016 199003 1 003



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

*Kampus I : Jalan Sultan Alauddin No. 63 Tlp (0411) 864928-864930 Fax. 864923
Kampus II : Jl. H. M. Yasin Limpo No. 36 Samata Sungguminasa – Gowa Telp. 841879 Fax 8221400*

Nomor : 2020/SL.1/PP.00.9/ .6. /2017
Sifat : Penting
Lamp : -
Hal : **UNDANGAN MUNAQASYAH**

Samata, 12 Juni 2017

Kepada

- Alh.* 1. Prof. Dr. Darussalam Syamsuddin, M.Ag. (Ketua)
2. Istiqmah, S.H., M.H. (Sekertaris)
3. Dr. Jumadi, S.H., M.H. (Penguji I)
4. Ashar Sinilele, S.H., M.H. (Penguji II)
5. Dr. Hamsir, M.Hum. (Pembimbing I)
6. Dr. Fadli Andi Natsif, M.H. (Pembimbing II)
7. Pelaksana

Di
Makassar

Assalamu 'Alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat, disampaikan bahwa Ujian Munaqasyah atas nama :

Nama : Rezeky Setyawan Amir

N I M : 10500113027

Jurusan : Ilmu Hukum

Untuk maksud tersebut, maka kami mengundang Saudara/(i) pada Ujian Munaqasyah, Insyah

Allah dilaksanakan pada :

Hari/Tanggal : Kamis, 15 Juni 2017

Buka Sidang : 08.30 WITA

Waktu : Pukul 10.00 – 11.00 WITA

Tempat : Ruang Ujian Munaqasyah

Atas perhatian dan kehadirannya diucapkan terima kasih.

Wassalam



Prof. Dr. Darussalam Syamsuddin, M.Ag
NIP. 19621016 199003 1 003



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Kampus I : Jl. Sultan Alauddin No. 63 Makassar ☎ (0411) 868720, Fax. (0411) 864923
 Kampus II : Jl. H.M. Yasin Limpo No.36, Romangpolong-Gowa ☎ (0411) 841879, Fax. (0411) 8221400

DAFTAR NILAI
UJIAN AKHIR PROGRAM STUDI/KOMPREHENSIF
 SEMESTER 8 (..... DELAPAN) WISUDA PERIODE
 TAHUN AKADEMIK 2015/2016

Nama : REZEKY SETYAWAN AMIR
NIM : 10500113027
Jurusan : ILMU HUKUM
Judul Skripsi : KEKUATAN HUKUM VISUM ET REPERTUM SEBAGAI PEMBUKTIAN
 TINDAK PIDANA PERKOJAAN (Studi kasus Pengadilan Negeri Sungguminasa)

NILAI MATA KULIAH				JUMLAH RATA-RATA
MKDU	MKDK	MKPP	KESELURUHAN	
(Dirasah Islamiyah)	(Fikih/Ushul Fikih)			
4	3	4	11	3,6

Samata, 8 Juni 2017

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

Kasubag
 Akademik dan Kemahasiswaan
ALAUDDIN
M A K A
MUJAHIDAH, S.E
 NIP : 19670309 199303 2 002



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Kampus I : Jl. Sultan Alauddin No. 63 Makassar ☎ (0411) 868720, Fax. (0411) 864923
 Kampus II : Jl. H.M. Yasin Limpo No.36, Romangpolong-Gowa ☎ (0411) 841879, Fax. (0411) 8221400

DAFTAR NILAI
UJIAN AKHIR PROGRAM STUDI/KOMPREHENSIF

Dosen Penguji : Dr. Nur Taufik Sanusi, M. Ag

Mata Ujian : ① MKDU / Dirasah Islamiyah
 2. MKDK / Fikih / Ushul Fikih
 3. MKPP / Ilmu Hukum

NO	NIM	NAMA MAHASISWA	JURUSAN	TANDA TANGAN	NILAI		KET
					HURUF	ANGKA	
1	10500113027	REZEKY SETYAWAN AMIR	ILMU HUKUM		A	90 4 -	

Samata, 02-05-2017

Penguji,

Dr. Nur Taufik Sanusi, M. Ag

NIP : 19780619 200312 1009



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Kampus I : Jl. Sultan Alauddin No. 63 Makassar ☎ (0411) 868720, Fax. (0411) 864923
Kampus II : Jl.H.M. Yasin Limpo No.36, Romangpolong-Gowa ☎ (0411) 841879, Fax.(0411) 8221400

DAFTAR NILAI
UJIAN AKHIR PROGRAM STUDI/KOMPREHENSIF

Dosen Penguji : Ashabul Kahfi, S.Ag, M.H

Mata Ujian : 1. MKDU / Dirasah Islamiyah
2. MKDK / Fikih / Ushul Fikih
3. MKPP / Ilmu Hukum

NO	NIM	NAMA MAHASISWA	JURUSAN	TANDA TANGAN	NILAI		KET
					HURUF	ANGKA	
1	10500113027	REZEKY SETYAWAN AMR	ILMU HUKUM		(A)	4	

Samata, 3 Mei 2017

Penguji,

Ashabul Kahfi, M.H.

NIP : 19740214 200801 1009



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Kampus I : Jl. Sultan Alauddin No. 63 Makassar ☎ (0411) 868720, Fax. (0411) 864923
 Kampus II : Jl.H.M. Yasin Limpo No.36, Romangpolong-Gowa ☎ (0411) 841879, Fax.(0411) 8221400

DAFTAR NILAI
UJIAN AKHIR PROGRAM STUDI/KOMPREHENSIF

Dosen Penguji : Dr. Hj. Rahmatiah HL, M.Pd

Mata Ujian : 1. MKDU / Dirasah Islamiyah
 2. MKDK / Fikih / Ushul Fikih
 3. MKPP / Ilmu Hukum

NO	NIM	NAMA MAHASISWA	JURUSAN	TANDA TANGAN	NILAI		KET
					HURUF	ANGKA	
1	10500113027	REZEKY SETYAWAN AKIR	ILMU HUKUM		B	3	

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

ALAUDDIN
MAKASSAR

Samata,

Penguji,

Dr. Hj. Rahmatiah HL, M.Pd

NIP :

DAFTAR HADIR UJIAN SEMINAR HASIL/SKRIPSI (S1)

NAMA : Rezeki Setyawan Amir

NIM : 10500113027

JURUSAN : Ilmu Hukum

JUDUL SKRIPSI : "Kekuatan Hukum Visum Et Repertum Sebagai Pembuktian
Tindak Pidana Perkosaan (Studi Kasus PN Sungguminasa)"

NO.	NAMA	JABATAN/STATUS	T. TANGAN
1.	Prof. Dr. Darussalam Syamsuddin, M.Ag	Ketua	1.
2.	Istqamah, S.H., M.H.	Sekretaris	2.
3.	Dr. Hamsir, S.H., M.Hum	Pembimbing	3.
4.	Dr. Fadli A. Natsif, S.H., M.H	Pembimbing	4.
5.	Dr. Jumadi, S.H., M.H	Penguji	5.
6.	Ashar Sinelele, S.H., M.H	Penguji	6.
7.	Mujahidah, SE	Pelaksana	7.
8.	Nurhayati Wahid	Pelaksana	8.
9.	Rezeki Setyawan Amir	Mahasiswa	8.

Samata, 02 Juni 2017

Ketua Panitia

Prof. Dr. Darussalam Syamsuddin, M.Ag.

NIP 19621016 199003 1 003

DAFTAR HADIR UJIAN SEMINAR HASIL/SKRIPSI (S1)

NAMA : Rezeki Setyawan Amir

NIM : 10500113027

JURUSAN : Ilmu Hukum

JUDUL SKRIPSI : "Kekuatan Hukum Visum Et Repertum Sebagai Pembuktian
Tindak Pidana Perkosaan (Studi Kasus PN Sungguminasa)"

NO.	NAMA	JABATAN/STATUS	T. TANGAN
1.	Prof. Dr. Darussalam Syamsuddin, M.Ag	Ketua	1.
2.	Istqamah, S.H., M.H.	Sekretaris	2.
3.	Dr. Hamsir, S.H., M.Hum	Pembimbing	3.
4.	Dr. Fadli A. Natsif, S.H., M.H	Pembimbing	4.
5.	Dr. Jumadi, S.H., M.H	Penguji	5.
6.	Ashar Sinelele, S.H., M.H	Penguji	6.
7.	Mujahidah, SE	Pelaksana	7.
8.	Nurhayati Wahid	Pelaksana	8.
9.	Rezeki Setyawan Amir	Mahasiswa	8.

Samata, 02 Juni 2017

Ketua Panitia

Prof. Dr. Darussalam Syamsuddin, M.Ag.
NIP 19621016 199003 1 003

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
MAKASSAR

LEMBARAN PERBAIKAN SEMINAR HASIL/SKRIPSI (S1)

NAMA : Rezeky Setyawan Amir
NIM : 10500113027
JURUSAN : Ilmu Hukum
JUDUL SKRIPSI : "Kekuatan Hukum Visum Et Repertum Sebagai Pembuktian
Tindak Pidana Perkosaan (Studi Kasus PN Sungguminasa) "

Chet. Rezeky Setyawan

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

ALAUDDIN
MAKASSAR

Samata, 02 Juni 2017
Penguji

Dr. H. H. H. H. H.

PENILAIAN UJIAN SEMINAR HASIL/SKRIPSI (S1)

NAMA : Rezeky Setyawan Amir
 NIM : 10500113027
 JURUSAN : Ilmu Hukum
 JUDUL SKRIPSI : "Kekuatan Hukum Visum Et Repertum Sebagai Pembuktian Tindak
 Pidana Perkosaan (Studi Kasus PN Sungguminasa)"

NO.	ASPEK YANG DINILAI	NILAI	RATA-RATA
1.	Metode Penelitian/Penulisan		
2.	Materi		
3.	Penguasaan/Analisa		
4.	Cara Presentase		
	Jumlah	A	9
	Nilai Akhir Rata-Rata/4 =	

UNIVERSITAS ISLAM SAMATA, 02 Juni 2017

Penilai,

Dr. H. ...

MAKASSAR

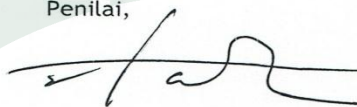
PENILAIAN UJIAN SEMINAR HASIL/SKRIPSI (S1)

NAMA : Rezeky Setyawan Amir
 NIM : 10500113027
 JURUSAN : Ilmu Hukum
 JUDUL SKRIPSI : "Kekuatan Hukum Visum Et Repertum Sebagai Pembuktian Tindak
 Pidana Perkosaan (Studi Kasus PN Sungguminasa)"

NO.	ASPEK YANG DINILAI	NILAI	RATA-RATA
1.	Metode Penelitian/Penulisan		
2.	Materi		
3.	Penguasaan/Analisa		
4.	Cara Presentase		
	Jumlah		
	Nilai Akhir Rata-Rata	16 / 4 =	4

Samata, 02 Juni 2017

Penilai,



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
 MAKASSAR

LEMBARAN PERBAIKAN SEMINAR HASIL/SKRIPSI (S1)

NAMA : Rezeky Setyawan Amir
NIM : 10500113027
JURUSAN : Ilmu Hukum
JUDUL SKRIPSI : "Kekuatan Hukum Visum Et Repertum Sebagai Pembuktian
Tindak Pidana Perkosaan (Studi Kasus PN Sungguminasa)"

3. Tambahkan paragraf bahwa Visum
et Repertum sah, harus ada
keterangan lain.

Samata, 02 Juni 2017

Penguji



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R

PENILAIAN UJIAN SEMINAR HASIL/SKRIPSI (S1)

NAMA : Rezeky Setyawan Amir
 NIM : 10500113027
 JURUSAN : Ilmu Hukum
 JUDUL SKRIPSI : "Kekuatan Hukum Visum Et Repertum Sebagai Pembuktian Tindak
 Pidana Perkosaan (Studi Kasus PN Sungguminasa)"

NO.	ASPEK YANG DINILAI	NILAI	RATA-RATA
1.	Metode Penelitian/Penulisan		
2.	Materi		
3.	Penguasaan/Analisa		
4.	Cara Presentase		
	Jumlah		
	Nilai Akhir Rata-Rata/4 =	(4) = A

Samata, 02 Juni 2017

Penilai,



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
 MAKASSAR

LEMBARAN PERBAIKAN SEMINAR HASIL/SKRIPSI (S1)

NAMA : Rezeky Setyawan Amir
NIM : 10500113027
JURUSAN : Ilmu Hukum
JUDUL SKRIPSI : "Kekuatan Hukum Visum Et Repertum Sebagai Pembuktian
Tindak Pidana Perkosaan (Studi Kasus PN Sungguminasa)"

Rezeky Setyawan Amir

Samata, 02 Juni 2017
Penguji

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
[Signature]
ALA UDDIN
M A K A S S A R

LEMBARAN PERBAIKAN SEMINAR HASIL/SKRIPSI (S1)

NAMA : Rezeky Setyawan Amir

NIM : 10500113027

JURUSAN : Ilmu Hukum

JUDUL SKRIPSI : "Kekuatan Hukum Visum Et Repertum Sebagai Pembuktian
Tindak Pidana Perkosaan (Studi Kasus PN Sungguminasa)"

fortuiter sesuai dengan petunjuk

Samata, 02 Juni 2017

Penguji

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
Amir
ALAUDDIN
MAKASSAR

PENILAIAN UJIAN SEMINAR HASIL/SKRIPSI (S1)

NAMA : Rezeky Setyawan Amir
 NIM : 10500113027
 JURUSAN : Ilmu Hukum
 JUDUL SKRIPSI : "Kekuatan Hukum Visum Et Repertum Sebagai Pembuktian Tindak
 Pidana Perkosaan (Studi Kasus PN Sungguminasa)"

NO.	ASPEK YANG DINILAI	NILAI	RATA-RATA
1.	Metode Penelitian/ Penulisan		
2.	Materi		
3.	Penguasaan/ Analisa		
4.	Cara Presentase		
	Jumlah		
	Nilai Akhir Rata-Rata/4 =	4

* Samata, 02 Juni 2017

Penilai,

Amir

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

ALAUDDIN
M A K A S S A R










DAFTAR HADIR UJIAN MUNAQASYAH/SKRIPSI (S1)

NAMA : Rezeky Setyawan Amir

NIM : 10500113027


JURUSAN : Ilmu Hukum

JUDUL SKRIPSI : "Kekuatan Hukum Visum Et Repertum Sebagai Pembuktian
Tindak Pidana Perkosaan (Studi Kasus Pengadilan Negeri
Sungguminasa)"

NO.	NAMA	JABATAN/STATUS	T. TANGAN
1.	Prof. Dr. Darussalam Syamsuddin, M.Ag	Ketua	1. 
2.	Istiqamah, S.H., M.H.	Sekretaris	2. 
3.	Dr. Hamsir, M.Hum	Pembimbing	3. 
4.	Dr. Fadli Andi Natsif, S.H., M.H.	Pembimbing	4. 
5.	Dr. Jumadi, S.H., M.H.	Penguji	5. 
6.	Ashar Sinitete, S.H., M.H.	Penguji	6. 
7.	Mujahidah, SE	Pelaksana	7. 
8.	Nurhayati Wahid	Pelaksana	8. 
9.	Rezeky Setyawan Amir	Mahasiswa	9. 

Samata, 15 Juni 2017

Ketua Panitia


Prof. Dr. Darussalam Syamsuddin, M.Ag.
NIP 19621016 199003 1 003

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
MAKASSAR










DAFTAR HADIR UJIAN MUNAQASYAH/SKRIPSI (S1)

NAMA : Rezeky Setyawan Amir

NIM : 10500113027


JURUSAN : Ilmu Hukum

JUDUL SKRIPSI : "Kekuatan Hukum Visum Et Repertum Sebagai Pembuktian
Tindak Pidana Perkosaan (Studi Kasus Pengadilan Negeri
Sungguminasa)"

NO.	NAMA	JABATAN/STATUS	T. TANGAN
1.	Prof. Dr. Darussalam Syamsuddin, M.Ag	Ketua	1. 
2.	Istiqamah, S.H., M.H.	Sekretaris	2. 
3.	Dr. Hamsir, M.Hum	Pembimbing	3. 
4.	Dr. Fadli Andi Natsif, S.H., M.H.	Pembimbing	4. 
5.	Dr. Jumadi, S.H., M.H.	Penguji	5. 
6.	Ashar Siniŕele, S.H., M.H.	Penguji	6. 
7.	Mujahidah, SE	Pelaksana	7. 
8.	Nurhayati Wahid	Pelaksana	8. 
9.	Rezeky Setyawan Amir	Mahasiswa	9. 

Samata, 15 Juni 2017

Ketua Panitia


Prof. Dr. Darussalam Syamsuddin, M.Ag.
NIP 19621016 199003 1 003

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
MAKASSAR

PENILAIAN UJIAN MUNAQASYAH/SKRIPSI (S1)

NAMA : Rezeky Setyawati Amir

NIM : 10500113027

JURUSAN : Ilmu Hukum

JUDUL SKRIPSI : “Kekuatan Hukum Visum Et Repertum Sebagai Pembuktian Tindak Pidana Perkosaan (Studi Kasus Pengadilan Negeri Sungguminasa)”

NO.	ASPEK YANG DINILAI	NILAI	RATA-RATA
1.	Metode Penelitian/ Penulisan		
2.	Materi		
3.	Penguasaan/ Analisa		
4.	Cara Presentase		
	Jumlah		
	Nilai Akhir Rata-Rata/4 =	4

Samata, 15 Juni 2017

Penilai,

Done

4
16/10/2024

PENILAIAN UJIAN MUNAQASYAH/SKRIPSI (S1)

NAMA : Rezeky Setyawan Amir

NIM : 10500113027

JURUSAN : Ilmu Hukum

JUDUL SKRIPSI : "Kekuatan Hukum Visum Et Repertum Sebagai Pembuktian
Tindak Pidana Perkosaan (Studi Kasus Pengadilan Negeri
Sungguminasa)"

NO.	ASPEK YANG DINILAI	NILAI	RATA-RATA
1.	Metode Penelitian/ Penulisan		4
2.	Materi		7
3.	Penguasaan/ Analisa		
4.	Cara Presentase		
	Jumlah		
	Nilai Akhir Rata-Rata / 4 =	4

Samata, 15 Juni 2017

Penilai,

Amir

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

ALAUDDIN

MAKASSAR

PENILAIAN UJIAN MUNAQASYAH/SKRIPSI (S1)

NAMA : Rezeky Setyawan Amir

NIM : 10500113027

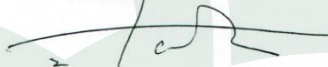
JURUSAN : Ilmu Hukum

JUDUL SKRIPSI : "Kekuatan Hukum Visum Et Repertum Sebagai Pembuktian
Tindak Pidana Perkosaan (Studi Kasus Pengadilan Negeri
Sungguminasa)"

NO.	ASPEK YANG DINILAI	NILAI	RATA-RATA
1.	Metode Penelitian/Penulisan		
2.	Materi		
3.	Penguasaan/Analisa		
4.	Cara Presentase		
	Jumlah		
	Nilai Akhir Rata-Rata 16 / 4 =	(4)

Samata, 15 Juni 2017

Penilai,



FADLI ANDI NATHA

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
 MAKASSAR

PENILAIAN UJIAN MUNAQASYAH/SKRIPSI (S1)

NAMA : Rezeky Setyawan Amir
 NIM : 10500113027
 JURUSAN : Ilmu Hukum
 JUDUL SKRIPSI : "Kekuatan Hukum Visum Et Repertum Sebagai Pembuktian
 Tindak Pidana Perkosaan (Studi Kasus Pengadilan Negeri
 Sungguminasa)"

NO.	ASPEK YANG DINILAI	NILAI	RATA-RATA
1.	Metode Penelitian/ Penulisan		
2.	Materi		
3.	Penguasaan/ Analisa		
4.	Cara Presentase		
	Jumlah		
	Nilai Akhir Rata-Rata/4 =	

Samata, 15 Juni 2017

Penilai,

Mr. Hamsir Jua

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
 MAKASSAR

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Penulis skripsi yang berjudul, **“Kekuatan Hukum Visum et Repertum Sebagai Pembuktian Tindak Pidana Perkosaan (Studi Kasus Pengadilan Negeri Sungguminasa)”** bernama lengkap Rezeky Setyawan Amir, Nim :10500113027, merupakan anak ke empat dari empat bersaudara dari pasangan Bapak H.Muh. Amir dan Ibu Hj.Sitti Rosmini.

Penulis mengawali jenjang pendidikan formal di Sekolah Dasar (SD) 6 Paruntu pada tahun 2002-2007, kemudian Penulis menempuh pendidikan di SMPN 3 Sinjai Utara tahun 2007-2010. Setelah itu penulis melanjutkan pendidikannya di SMAN 1 Sinjai tahun 2010-2013. Dengan tahun yang sama yakni tahun 2013, penulis melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar melalui SPMB-PTAIN JALUR PRESTASI dan lulus di Fakultas Syariah dan Hukum, Jurusan Ilmu Hukum hingga tahun 2017.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
 MAKASSAR